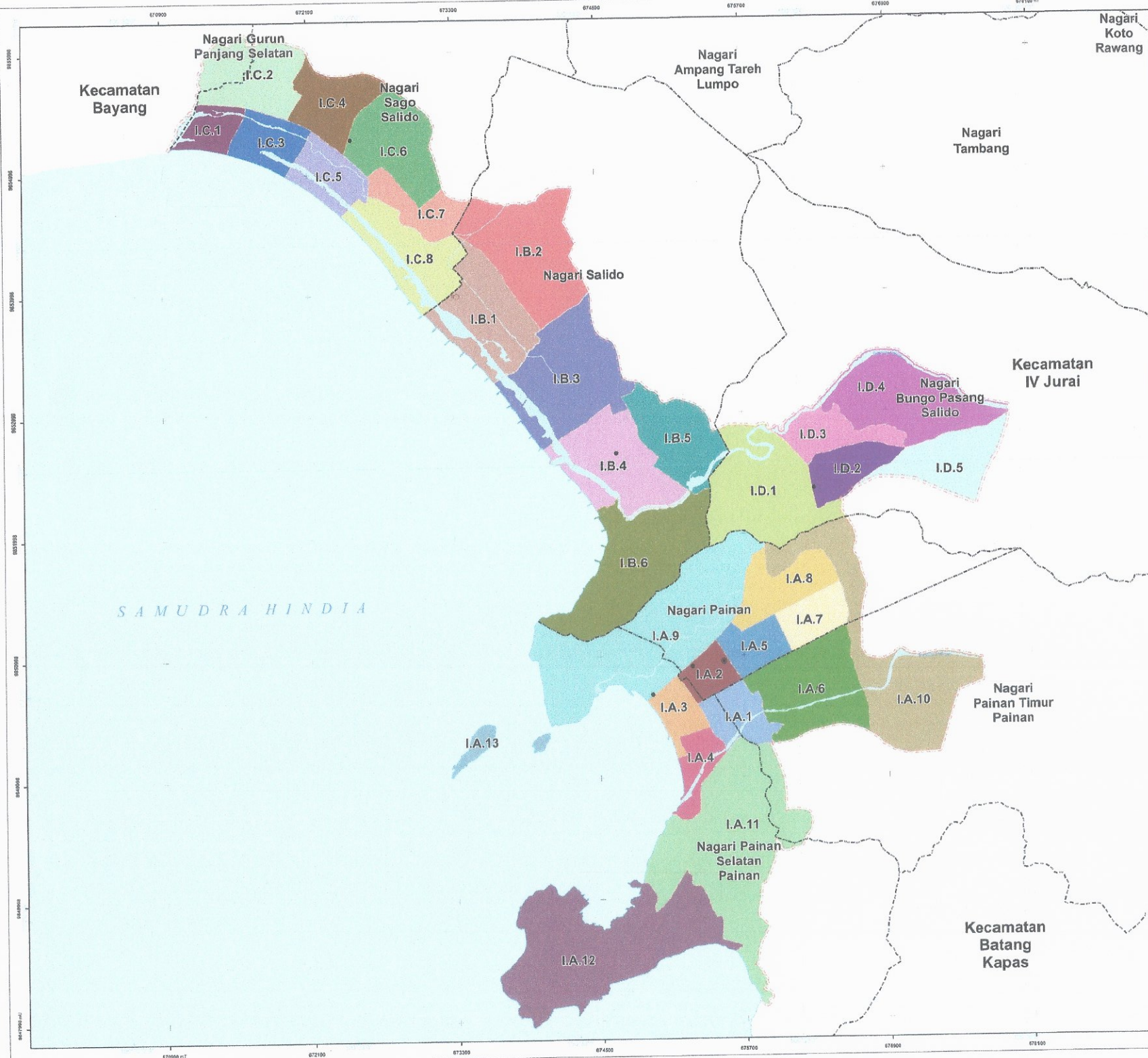






PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

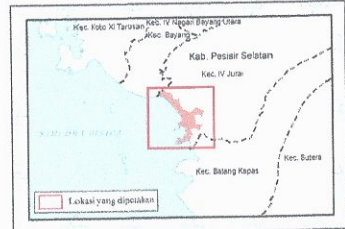
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN

U
SKALA : 1:15.000
0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2009

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ● Ibukota Kabupaten/Kota ● Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Nagari	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Nagari	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Dlok
---	---	---

Perairan
--- Garis Pantai
--- Batasan Air

Batas Wilayah Perencanaan

I.A.1	I.B.4
I.A.2	I.B.5
I.A.3	I.B.6
I.A.4	I.C.1
I.A.5	I.C.2
I.A.6	I.C.3
I.A.7	I.C.4
I.A.8	I.C.5
I.A.9	I.C.6
I.A.10	I.C.7
I.A.11	I.C.8
I.A.12	I.D.1
I.A.13	I.D.2
I.B.1	I.D.3
I.B.2	I.D.4
I.B.3	I.D.5

Penjelasan Kode Lokasi

WP	SWP	Dlok
----	-----	------

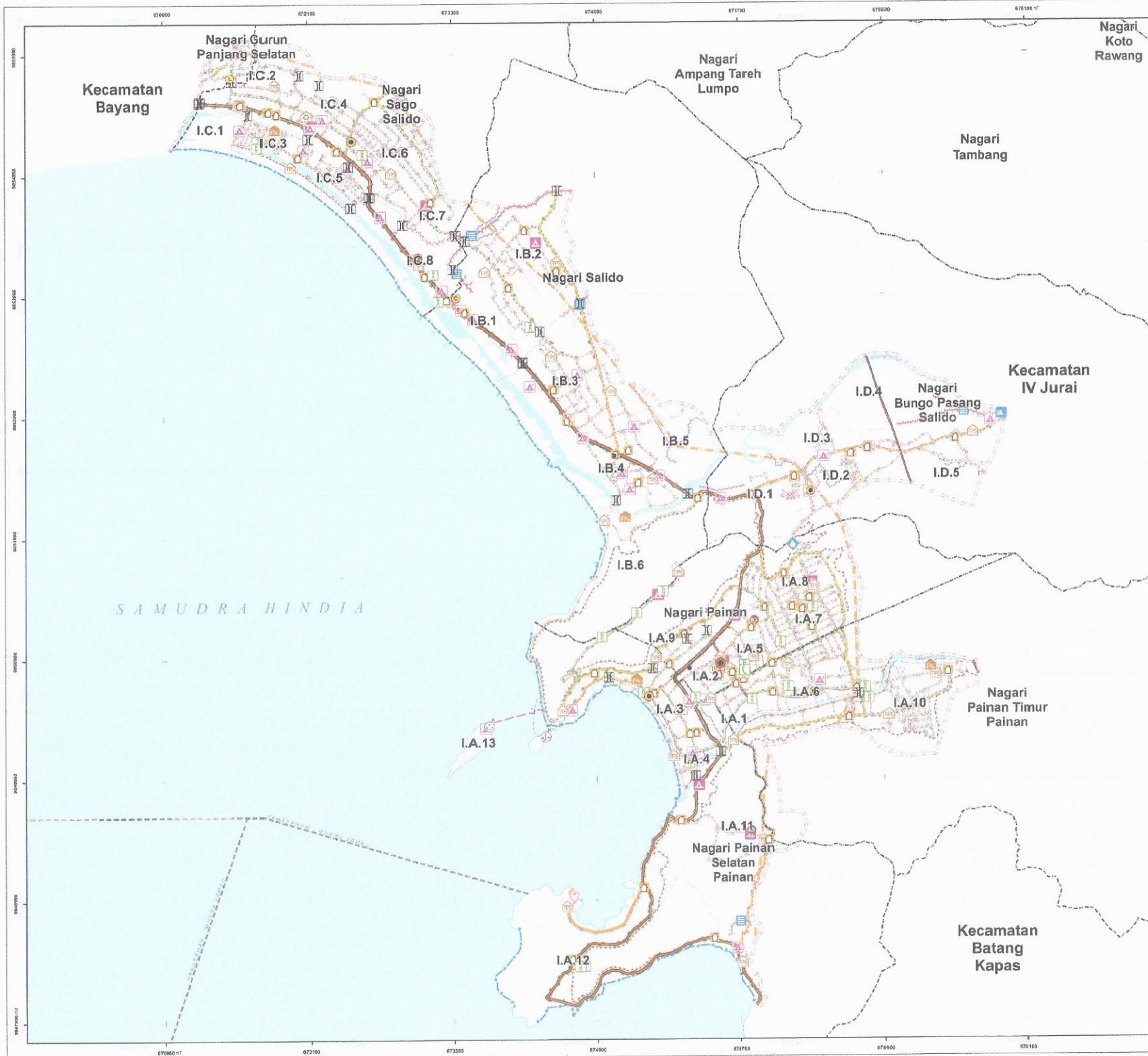
SUMBER DATA DAN BAWAH PETA :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2023
- Cara Satek (Satellite) Hasil Pengukuran tahun 2019
- Peta Dasar yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengukuran data topografi Nagari Kecamatan IV Juru tahun 2021
- Pengukuran data tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini bukan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum administratif

Mengetahui
BUPATI PESISIR SELATAN
Rusli Yul Anwar





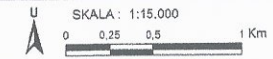
Nagari
Koto
Rawang



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

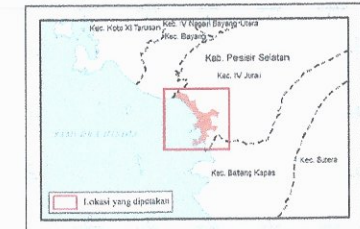
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

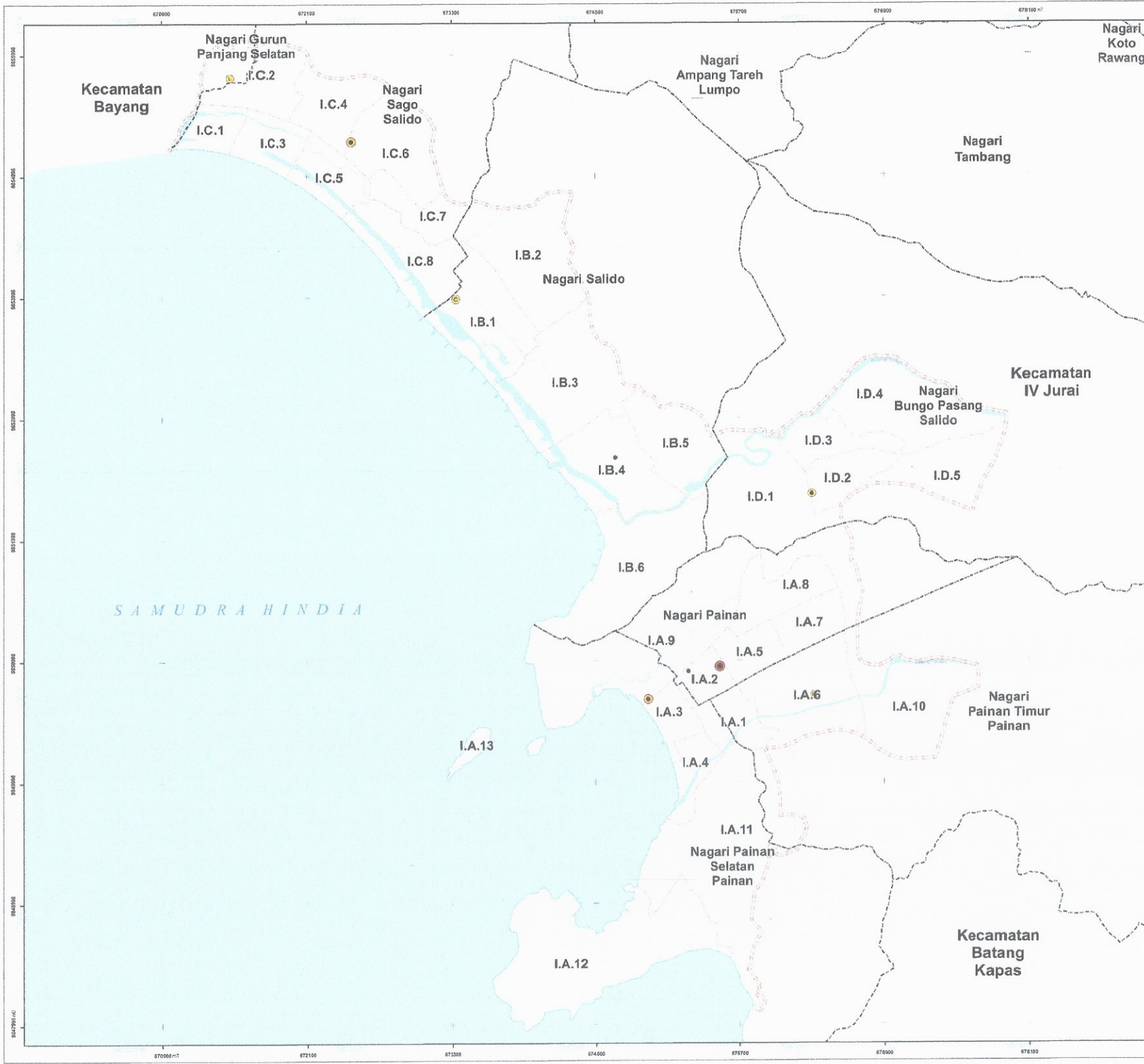


KETERANGAN :

- | | | |
|---|--|--|
| Ibukota Pemerintahan <ul style="list-style-type: none">Ibukota Kabupaten/KotaIbukota KecamatanIbukota Desa/Nagari | Batas Administrasi <ul style="list-style-type: none">Batas KecamatanBatas Desa/Nagari | Batas Perencanaan <ul style="list-style-type: none">Batas VWPBatas SWPBatas Blok |
| Perairan <ul style="list-style-type: none">Garis PantaiBatikan Air | Rencana Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none">Menara Base Transceiver Station (BTS)Sentrali Telepon Domestik (STO)Jaringan Serat Optik | Rencana Jaringan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none">BendunganPintu AirJaringan Irigasi SekunderJaringan Irigasi Tersier |
| Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan <ul style="list-style-type: none">Pusat Pelayanan Kota/Kawasan PerkotaanSub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan PerkotaanPusat Lingkungan KecamatanPusat Lingkungan Kelurahan/Desa | Rencana Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none">Terminal AirJaringan Transmisi Air MinumJaringan Distribusi Pembagi | Rencana Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none">Jaringan Drainase PrimerJaringan Drainase SekunderJaringan Drainase Tersier |
| Rencana Jaringan Transportasi Darat <ul style="list-style-type: none">Terminal Perumpang Tipe BJembatanJalan TolJalan Arteri PrimerJalan Arteri SekunderJalan Kolektor PrimerJalan Kolektor SekunderJalan Lokal SekunderJalan Khusus | Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <ul style="list-style-type: none">IPAL Skala Kawasan Tertentu/PermukimanSistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Rencana Jaringan Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <ul style="list-style-type: none">Tempat Penampungan Sementara (TPS)Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R) |
| Transportasi Laut <ul style="list-style-type: none">Pengelolaan Pendaratan IkanPelabuhan PengumpulTerminal KhususLintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Rencana Jaringan Energi <ul style="list-style-type: none">Gardu DistribusiSakuran Udara Tegangan Tinggi (SUTTT)Sakuran Udara Tegangan Menengah (SUTM)Sakuran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | Rencana Jaringan Prasarana Lainnya <ul style="list-style-type: none">Tempat Evakuasi SementaraTempat Evakuasi AkhirJalur Evakuasi BencanaJalur SepedaJaringan Pejalan KakiPengaman PantaiTanggul Perataan Longsor |
| Penjelasan Kode Lokasi <ul style="list-style-type: none">VWPSWPBlok | | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018-2030
2. Citra Raster Rincinasi Topografi (RSRT) Produk pengamatan tahun 2019
3. Peta dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengumpulan dan pengolahan data lapangan tahun 2022-2023
5. Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini bukan dokumen resmi yang dapat dijadikan dasar administrasi.
Diketahui,
BUPATI PESISIR SELATAN
Rusma Yuli Anwar





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IIA
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

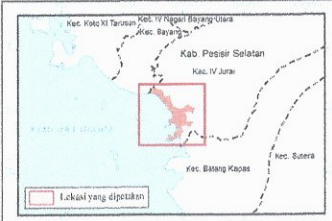
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
● Ibukota Desa/Nagari		--- Batas Blok

Perairan

- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Keemasan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi

WP	SWP	Blok
I.A.1		

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA :

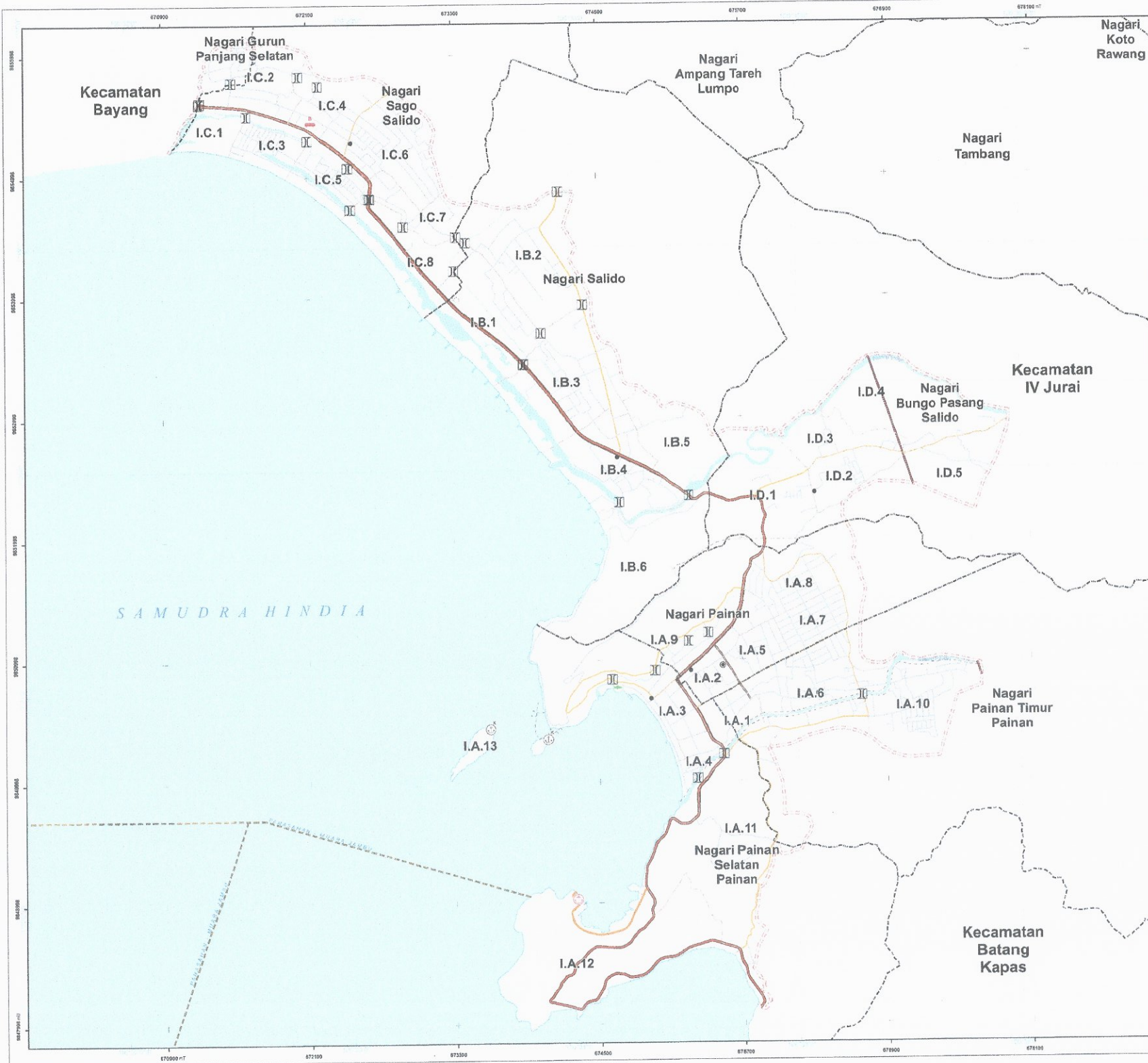
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2030
- Citra satelit Real-time (RTM) (COST) Petares perolehan tahun 2019
- Peta dasar yang telah teroreksi (dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Penelitian dan Pengamatan Batas Nagari Kecamatan IV Jurai tahun 2021
- Pengamatan citra satelit tahun 2022-2023

CATATAN :

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis perbatasan administratif

Mengetahui
BUPATI PESISIR SELATAN

Rusmi Yul Anwar





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

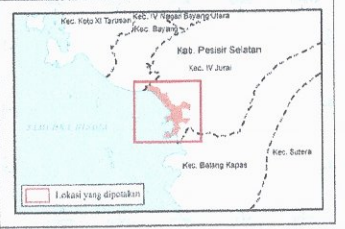
LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

U
SKALA : 1:15.000
0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ● Ibukota Kabupaten/Kota ● Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Negeri	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Negeri	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SVP --- Batas Blok
---	---	---

Perairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi**

Transportasi Darat
--- Terminal Penumpang Tipe B
--- Jembatan
--- Jalan Tol
--- Jalan Arteri Primer
--- Jalan Arteri Sekunder
--- Jalan Kolektor Primer
--- Jalan Kolektor Sekunder
--- Jalan Lokal Sekunder
--- Jalan Khusus

Transportasi Laut
--- Pengkalan Pendaratan Ikan
--- Pelabuhan Pengumpul
--- Terminal Khusus
--- Jalas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Penjelasan Kode Lokasi
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.A.4
I.A.5
I.A.6
I.A.7
I.A.8
I.A.9
I.A.10
I.A.11
I.A.12
I.B.1
I.B.2
I.B.3
I.B.4
I.B.5
I.B.6
I.C.1
I.C.2
I.C.3
I.C.4
I.C.5
I.C.6
I.C.7
I.C.8
I.D.1
I.D.2
I.D.3
I.D.4
I.D.5

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang RZWP3K Sumatera Barat
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030
3. Kepermen Perhubungan No. 158/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
4. Kepermen PUPR Nomor 103/2022 tentang Penetapan Rute Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsi
5. SE Dirjen Bina Jalan Nomor 1035/2020 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 348/2023 tentang Penetapan Status Rute Jalan Menurut Fungsi dan Klasifikasi Rute Jalan
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 556/2023 tentang Nama-nama Jalan Kota Kecamatan IV Jura
8. SK No. 600/1000/2018/PT-PS/2018 tentang Penetapan Status Rute Jalan Selangai Jalan Kabupaten
9. Chikastati Regulasi Negeri (CSRT) Peta Rute Jalan Kabupaten
10. Skema Dasar yang telah direvisi pada Rencana Informasi Prodesasi (RIP) tahun 2022
11. Penetapan dan Penetapan Batas Negeri Kecamatan IV Jura tahun 2022
12. Pengantar data tahun 2022-2023

CATATAN
Peta ini bukan referensi untuk kegiatan pelayanan publik atau administrasi

Mengeluhi
BUPATI PESISIR SELATAN
Rusma Yuli Anwar

LAMPIRAN II.C
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 – 2043

TABEL JALAN LOKAL SEKUNDER PERKOTAAN PAINAN

NO	NAMA RUAS JALAN	WP	SWP	SUMBER
1	GG. TANJUNG 1	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
2	GG. TANJUNG 2	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
3	SALIDO - CAROCOK PAINAN	I	A	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
4	Tidak Ada	I	A	Rencana RDTR, 2023
5	Tidak Ada	I	B	Rencana RDTR, 2023
6	Tidak Ada	I	C	Rencana RDTR, 2023
7	Tidak Ada	I	D	Rencana RDTR, 2023
8	ASRAMA TNI - SEKITARNYA	I	B	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
9	BANDARASA - BPP LABAN	I	B	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
10	DOLOG - LABAN	I	B	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
11	GG. BUNTU SEPAKAT	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
12	GG. CENDRAWASIH	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
13	GG. JAMBAK 1	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
14	GG. JAMBAK 3	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
15	GG. MAKMUR I	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
16	GG. MAKMUR II	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
17	GG. MELAYU	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
18	GG. MERAK	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
19	GG. MERPATI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
20	GG. NUSA INDAH III	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
21	GG. PANAI 1	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
22	GG. PANAI 2	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
23	GG. PANAI 3	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
24	GG. PERUMAHAN NELAYAN I	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
25	GG. PERUMAHAN NELAYAN II	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
26	GG. PIL 1	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :

NO	NAMA RUAS JALAN	WP	SWP	SUMBER
				550/629/Kpts/BPT-PS/2021
27	GG. PIL 2	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
28	GG. TEPAN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
29	GG. TERATAI I	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
30	GG. TERATAI II	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
31	GG. TODAK	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
32	GG. WALI MAKMUR	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
33	JLN. ABDUL MUIN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
34	JLN. ABDUL MUIS	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
35	JLN. ABRAR	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
36	JLN. AGOESMAN RJ BASA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
37	JLN. AHMAD RIVA'I	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
38	JLN. AIR DUKU	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
39	JLN. AKASIA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
40	JLN. AMBACANG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
41	JLN. AMBU-AMBU	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
42	JLN. AMIROEDDIN DT R. SYARIF	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
43	JLN. AR KARTINI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
44	JLN. AR. HAKIM	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
45	JLN. ARBI SANIT	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
46	JLN. ASOI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
47	JLN. ASRAMA POLISI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
48	JLN. BAIHAQI HAKIM	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
49	JLN. BAKHTIAR DT PADC PENGHULU	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
50	JLN. BALEDANG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
51	JLN. BARA KUDA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
52	JLN. BATU ANJUANG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
53	JLN. BATU ANJUANG 2	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021

NO	NAMA RUAS JALAN	WP	SWP	SUMBER
54	JLN. BAWAL	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
55	JLN. BOER YOESEOF	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
56	JLN. BUKIT JAMBAK	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
57	JLN. BUNDO KANDUANG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
58	JLN. CAKALANG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
59	JLN. CENDANA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
60	JLN. CINDUA MATO	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
61	JLN. DAHLIA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
62	JLN. DARWIS	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
63	JLN. DIPENOGORO	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
64	JLN. DURIAN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
65	JLN. FARMASI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
66	JLN. H. M. THAMRIN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
67	JLN. HASROEL DT RKY BASA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
68	JLN. IS ANWAR DT R. PERAK	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
69	JLN. ISMAIL LENGAH	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
70	JLN. JAMAL LAKO SUTAN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
71	JLN. KAMANG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
72	JLN. KAMIL KAMKA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
73	JLN. KANDO MAHARAJO	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
74	JLN. KERAPU	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
75	JLN. KH. AHMAD DAHLAN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
76	JLN. KHATIB SULAIMAN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
77	JLN. KOTO TINGGI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
78	JLN. KUINI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
79	JLN. KUTILANG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
80	JLN. LAPANGAN BOLA ATAS	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
81	JLN. LUKMAN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :

NO	NAMA RUAS JALAN	WP	SWP	SUMBER
				550/629/Kpts/BPT-PS/2021
82	JLN. M. HUSIN DT MDR BASA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
83	JLN. M. NOER	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
84	JLN. M. NOER ISKANDAR	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
85	JLN. M. SYAFI'I	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
86	JLN. M. SYAHMINAN SYAH	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
87	JLN. M. YAMIN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
88	JLN. MAHONI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
89	JLN. MANDALA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
90	JLN. MANGGA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
91	JLN. MANGGIS	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
92	JLN. MARA BAGANTI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
93	JLN. MARAPALAM	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
94	JLN. MARTA WIJAYA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
95	JLN. MASDAR SAISA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
96	JLN. MEGA PERMAI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
97	JLN. MERANTIH	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
98	JLN. NAN BATUAH	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
99	JLN. NANGKA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
100	JLN. NASRUL ABIT	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
101	JLN. NURI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
102	JLN. NUSKAM SYARIF	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
103	JLN. PAGARUYUNG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
104	JLN. PAGARUYUNG I	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
105	JLN. PAGARUYUNG II	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
106	JLN. PAGARUYUNG III	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
107	JLN. PAGARUYUNG IV	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
108	JLN. PANTO	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021

NO	NAMA RUAS JALAN	WP	SWP	SUMBER
109	JLN. PAUAH	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
110	JLN. PEMUDA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
111	JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
112	JLN. PESONA BAHARI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
113	JLN. PINANG KETEK	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
114	JLN. PIRIN ASMARA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
115	JLN. PRAMUKA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
116	JLN. PULAI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
117	JLN. PULAU AUR	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
118	JLN. PULAU BINTANGOR	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
119	JLN. PULAU CINGKUAK	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
120	JLN. PULAU KERABAK	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
121	JLN. PULAU PAGANG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
122	JLN. PULAU PENYU	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
123	JLN. PULAU SEMANGKI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
124	JLN. PULAU SIRONJONG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
125	JLN. PUNCAK PDAM	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
126	JLN. PUNCAK PDAM	I	D	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
127	JLN. RADEN SALEH	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
128	JLN. RAJO ALAM	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
129	JLN. RAJO BAGINDO	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
130	JLN. RAJO BATUAH	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
131	JLN. RAJO INTAN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
132	JLN. RAJO JOHAN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
133	JLN. RAJO KACIAK	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
134	JLN. RAJO MANGKUTO	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
135	JLN. RAJO NAN SATI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
136	JLN. RANGKAYO BASA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :

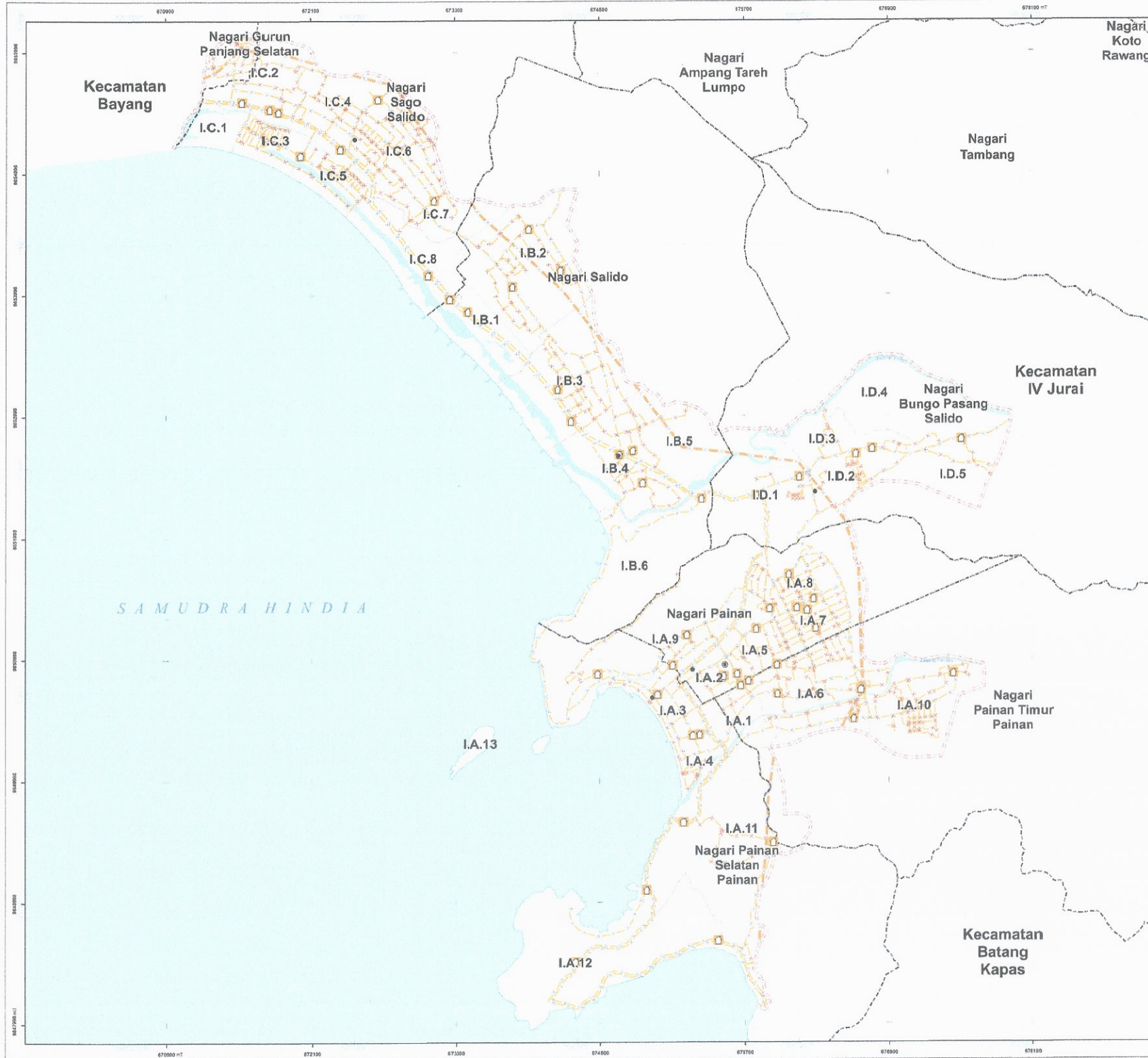
NO	NAMA RUAS JALAN	WP	SWP	SUMBER
				550/629/Kpts/BPT-PS/2021
137	JLN. RASUNA SAID	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
138	JLN. ROHANA KUDUS	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
139	JLN. RUSLI NASUTION	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
140	JLN. RUSYID AMRA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
141	JLN. SAMPONO KAYO	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
142	JLN. SARI MAHARAJO	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
143	JLN. SETIA BUDI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
144	JLN. SULTAN AGUNG	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
145	JLN. SULTAN HASANUDDIN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
146	JLN. SINGKAI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
147	JLN. SYAIFUL NAZAR	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
148	JLN. TALANAI SATI	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
149	JLN. TALAO	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
150	JLN. TENTARA PELAJAR II	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
151	JLN. TONGKOL	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
152	JLN. TRITURA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
153	JLN. TUNA	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
154	JLN. UDIN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
155	JLN. USMAN MAHMUD	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
156	JLN. WISATA BUKIT LANGKISAU	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
157	JLN. WISATA BUKIT LANGKISAU	I	B	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
158	JLN. ZAINI ZEIN	I	A	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/629/Kpts/BPT-PS/2021
159	KARANG SAGO - KAMPUNG BARU	I	C	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
160	PASAR SAGO - TELUK BELIBIS	I	C	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
161	PASAR SALIDO - KAMPUNG LUAR	I	B	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
162	SAGO - TELUK BELIBIS	I	C	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
163	SALIDO - CAROCOK PAINAN	I	A	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016

NO	NAMA RUAS JALAN	WP	SWP	SUMBER
164	SALIDO - CAROCOK PAINAN	I	B	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
165	SALIDO - SIANIK	I	B	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
166	SALIDO - SIANIK	I	C	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
167	SIMP. BANDARASA - LABAN	I	B	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
168	SIMP. KANTOR TNKS - TELUK NIBUNG	I	C	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
169	SIMP. MASJID SAGO - PASAR TERNAK	I	C	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
170	SP. MESJID SALIDO - TSANAWIYAH	I	B	SK Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, 2016
171	Tidak Ada	I	A	Hasil Digitasi Peta Dasar Kota Painan pada Citra Satelit Resolusi 0,5 meter, Plaides 2019
172	Tidak Ada	I	B	Hasil Digitasi Peta Dasar Kota Painan pada Citra Satelit Resolusi 0,5 meter, Plaides 2019
173	Tidak Ada	I	C	Hasil Digitasi Peta Dasar Kota Painan pada Citra Satelit Resolusi 0,5 meter, Plaides 2019
174	Tidak Ada	I	D	Hasil Digitasi Peta Dasar Kota Painan pada Citra Satelit Resolusi 0,5 meter, Plaides 2019
175	Tidak Ada	I	B	RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010 - 2030
176	Tidak Ada	I	A	Rencana RDTR, 2023



BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

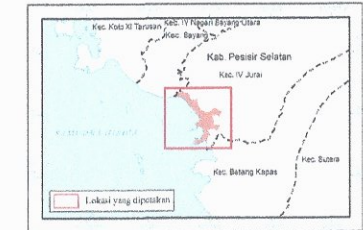
LAMPIRAN I.LD
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

U
SKALA : 1:15.000
0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---|---|--|
| Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten/Kota
● Ibukota Kecamatan
● Ibukota Desa/Nagari | Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Nagari | Batas Perencanaan
--- Batas VSP
--- Batas BWP
--- Batas Blok |
|---|---|--|
- Perairan**
--- Garis Pantai
--- Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Energi
□ Gardu Distribusi
--- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
--- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
--- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Penjelasan Kode Lokasi

VSP
BWP
Blok

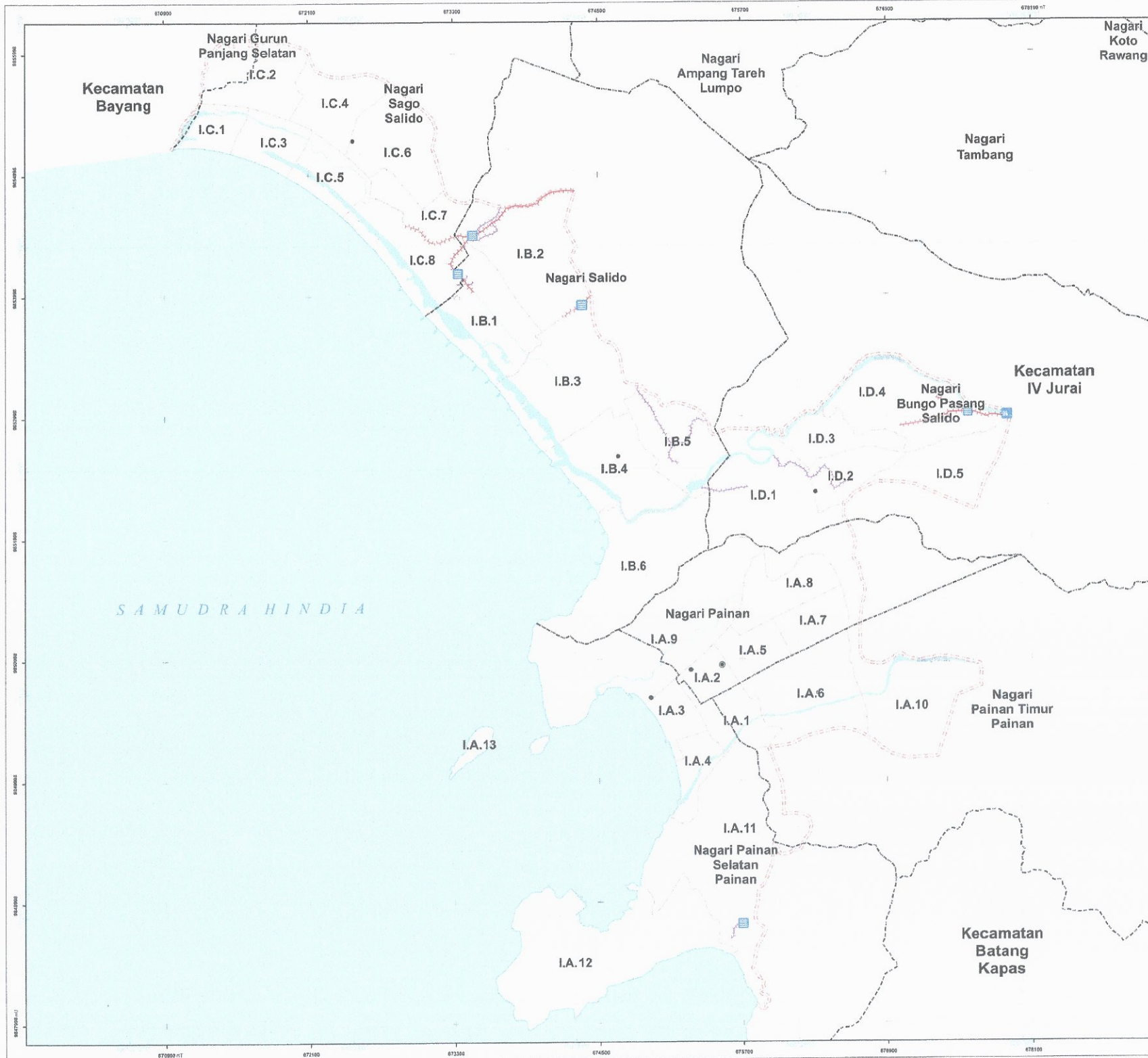
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2030
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSTRT) PetaSat tahun 2018
3. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Peta dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
5. Data Kabupaten Pesisir Selatan (KSP) tahun 2021
6. Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :

Proyeksi referensi: UTM (Universal Transverse Mercator) zona 47 S

Mengetahui
BUPATI PESISIR SELATAN
Ruma Yul Anwar



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN II.F
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:15.000
0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

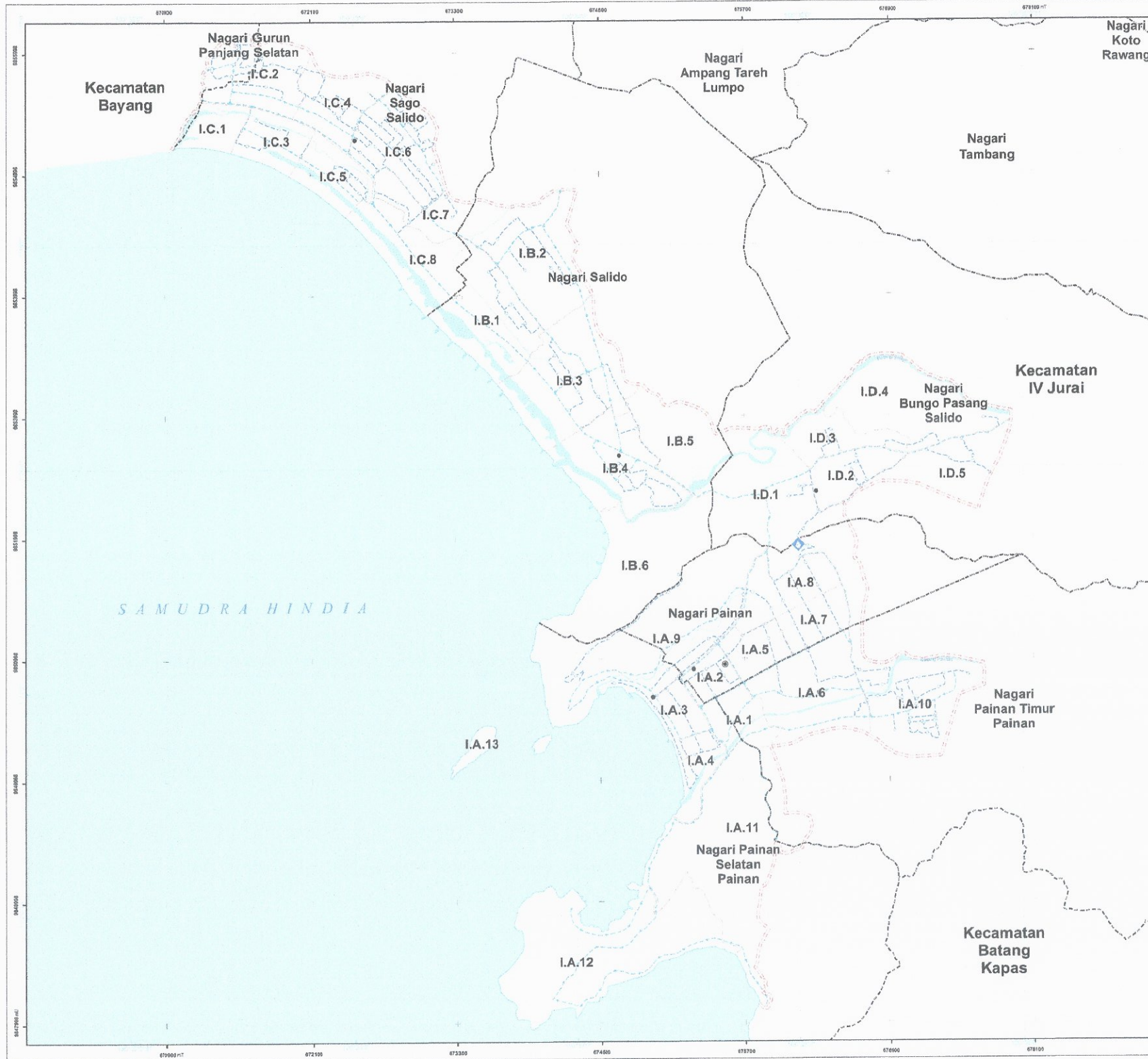
- Ibukota Pemerintahan :**
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
 - Ibukota Desa/Nagari
- Batas Administrasi :**
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Nagari
- Batas Perencanaan :**
 - Batas WP
 - Batas SWP
 - Batas Blok
- Perairan :**
 - Garis Pantai
 - Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
 - Rencana Jaringan Sumber Daya Air**
 - Bendungan
 - Pintu Air
 - Jaringan Irigasi Sekunder
 - Jaringan Irigasi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

- SUMBER DATA DAN RUMAH PETA**
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2002 tentang RTM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030
 - Daftar Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTM) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010
 - Peta Dasar yang telah terakumulasi dan terakumulasi dengan informasi dasar tahun 2022
 - Penelitian dan Pengamatan Badan Air dan Kecamatan IV Jurai tahun 2021
 - Daftar Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTM) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023
 - Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini bukan dokumen resmi pemerintah daerah, hanya untuk informasi.







PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN II.G
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

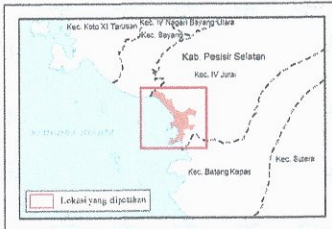
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA : 1:15.000

0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Kecamatan	--- Batas WPP
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Nagari	--- Batas SWP
● Ibukota Desa/Nagari		--- Batas Blok

Perairan

--- Salak Pantai
--- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum**

◆ Terminal Air
--- Jaringan Transmisi Air Minum
--- Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13

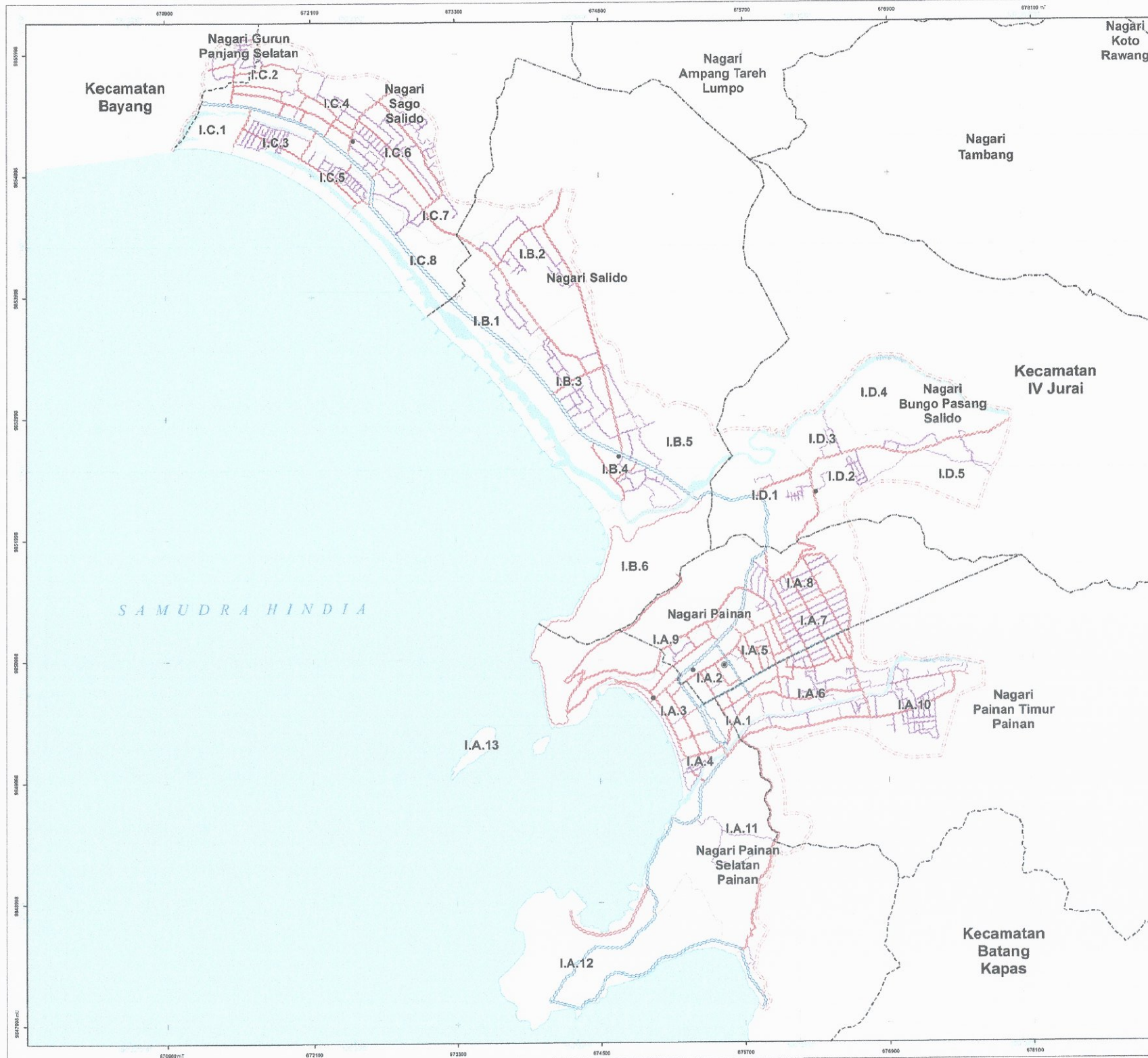
SUMBER DATA DAN RUMAH PETA :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2030
2. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019
3. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Peraturan dan Peraturan (Batas Nagari Kecamatan IV Jurai tahun 2021)
5. RTRW Kota Langkat tahun 2022
6. RTRW Kota Langkat tahun 2022-2033

CATATAN:
Peta ini bukan referensi hukum mengenai garis batas administratif

Mengetahui,
BUPATI PESISIR SELATAN

Risma Yul Anwar



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

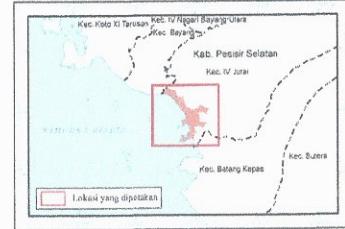
LAMPIRAN II/J
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**

U SKALA : 1:15.000
0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



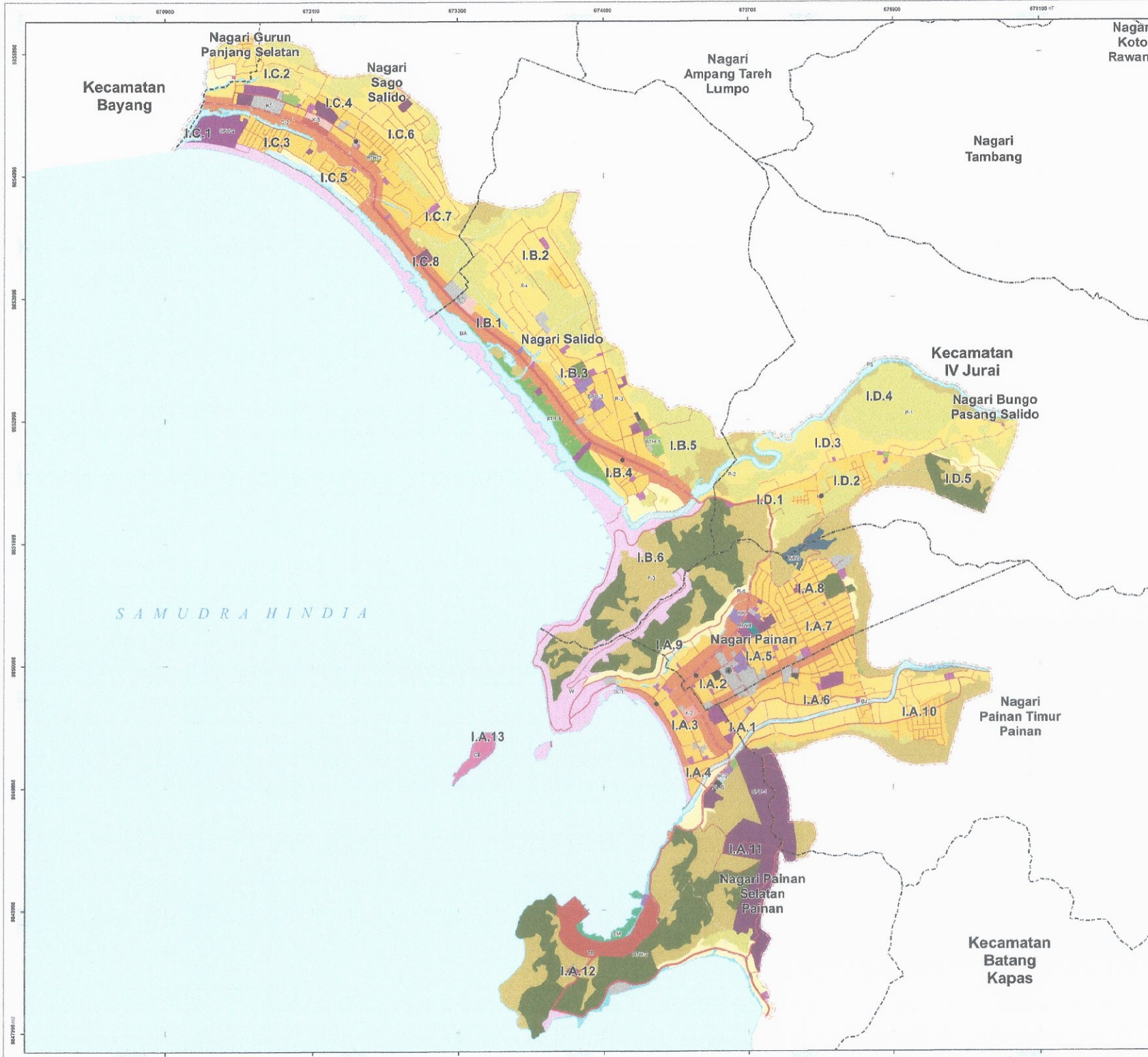
KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| Batas Administrasi
● Batukota Kabupaten/Kota
● Batukota Kecamatan
● Batukota Desa/Nagari | Batas Perencanaan
--- Batas WVP
--- Batas SWP
--- Batas Blok |
|--|--|
- Perairan**
--- Garis Pantai
--- Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
RENCANA JARINGAN DRAINASE
--- Jaringan Drainase Primer
--- Jaringan Drainase Sekunder
--- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

- SUMBER DATA DAN WAWAT PETA :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2035
 2. Data Sektoral Kabupaten Pesisir Selatan (DSS) Peta dasar tahun 2019
 3. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 4. Hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat
 5. Masterplan Drainase Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022
 6. Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat setempat.
Mengetahui
BUPATI PESISIR SELATAN
Rusma Yuli Anwar



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

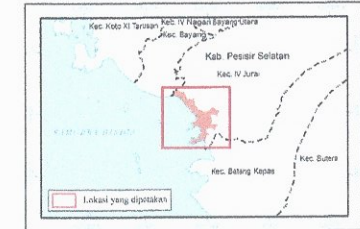
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:15.000
0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---|---|---|
| Ikut Kota Pemerintahan
● Ikut Kota Kabupaten/Kota
● Ikut Kota Kecamatan
● Ikut Kota Desa/Nagari | Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Nagari | Batas Perencanaan
--- Batas VWP
--- Batas SVP
--- Batas Blok |
| Perairan
--- Garis Pantai | RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Badan Air
1. Badan Air
Zona Perlindungan Setempat
2. Perlindungan Setempat
Zona Cagar Budaya
3. Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove
4. Ekosistem Mangrove
Zona Ruang Terbuka Hijau
5. Taman Kota
6. Taman Kecamatan
7. Pemukiman
8. Jalur Hijau |
| ZONA BUDI DAYA
Zona Badan Jalan
9. Badan Jalan
Zona Perumahan
10. Perumahan Kapadatan Sedang
11. Perumahan Kapadatan Rendah
12. Perumahan Kapadatan Sangat Rendah
Zona Perdagangan dan Jasa
13. Perdagangan dan Jasa Skala WP
14. Perdagangan dan Jasa Skala SVP
Zona Sarana Pelayaran Umum
15. SPU Skala Kota
16. SPU Skala Kecamatan
17. SPU Skala Kelurahan
Zona Perikanan
18. Perikanan
Zona Pertanian
19. Tanaman Pangan
20. Hortikultura | Zona Perikanan
21. Perikanan Tangkap
22. Perikanan Budi Daya
Zona Pariwisata
23. Pariwisata
Zona Campuran
24. Campuran Intensitas Menengah/Sedang
Zona Pertambangan
25. Pertambangan Mineral Bukan Logam
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
26. Ruang Terbuka Non Hijau
Zona Pertahanan dan Keamanan
27. Pertahanan dan Keamanan
Zona Transportasi
28. Transportasi
Zona Peruntukan Lainnya
29. Pergudangan | |

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2035
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSTRT) Projeck penekanan Bayu 2019
3. Peta Dasar yang telah direvisi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Penetapan dan penetapan Batas Nagari Kecamatan IV Jurai tahun 2021
5. Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis perbatasan administrasi

Mengetahui,
BUPATI PESISIR SELATAN
Ruma Yul Anwa

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 – 2043

Tabel Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang Prioritas WP Perkotaan Painan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG									
A.1	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan									
A	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK)	Nagari Painan SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang
B	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK)	Nagari Painan Selatan Painan SWP A Blok I.A.9 Nagari Sago Salido SWP C Blok I.C.6							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang
C	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pusat Lingkungan Kecamatan	Nagari Salido SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang
D	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Nagari Painan Timur Painan SWP A Blok I.A.6 Nagari Gurun Panjang Selatan SWP C Blok I.C.2 Nagari Bungo Pasang Salido SWP D Blok I.D.2							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang
A.2	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi									
A	Jalan Arteri									
	a.1. pembangunan dan pemeliharaan jalan arteri primer	1. Bts. Kota Padang – Bts. Kota Painan melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D; 2. Bts. Kota Painan – Kambang melalui SWP A; 3. Jalan Ilyas Yakub (Painan) melalui SWP A; dan 4. Jalan Sutan Syahrir (Painan) melalui SWP A							APBN	Pemerintah pusat yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
	a.2. pembangunan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder	Jln. H. Agus Salim melalui SWP A							APBD Kabupaten	Pemerintah Daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	a.2. pengembangan perlengkapan jalan di jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBN, APBD Provinsi	Pemerintah pusat dan provinsi yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
B	Jalan Kolektor									
	b.1. pembangunan dan pemeliharaan jalan kolektor primer	Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan melalui SWP A							APBD Provinsi	Pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan pekerjaan umum
	b.2. pengembangan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder	1. Jln. Banda Sapuluah pada SWP A; 2. Jln. Bukit Putus Indah pada SWP A; 3. Jln. Dr. Hamka pada SWP A; 4. Jln. Farmasi pada SWP A; 5. Jln. Imam Bonjol pada SWP A; 6. Jln. Kabun Lapas pada SWP A; 7. Jln. Mohammad Hatta pada SWP A; 8. Jln. Nusantara pada SWP A; 9. Jln. Pahlawan pada SWP A; 10. Jln. Pincuran Madam pada SWP A; 11. Jln. Tentara Pelajar I pada SWP A; 12. Jln. Trikora pada SWP A; 13. Salido - Batu Kunik pada SWP B; 14. Sianik Sago – Lumpo pada SWP C; 15. Simp. Bungo Pasang - Salido Kecil pada SWP D; dan 16. Jalan lainnya pada SWP A.							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan pekerjaan umum
	b.3. pengembangan perlengkapan jalan di jalan kolektor primer dan kolektor sekunder	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah pusat dan daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
										bidang penataan pekerjaan umum
c	Jalan lokal									
	c.1. pembangunan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan pekerjaan umum
	c.2. pengembangan perlengkapan jalan di jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan pekerjaan umum
d	Jalan Khusus									
	d.1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan khusus wisata, dermaga, dan inspeksi	SWP A, SWP B dan SWP D							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan pekerjaan umum
e	Jalan Tol									
	e.1 Pembangunan Jalan Tol	Jalan Tol Padang – Bengkulu pada SWP A dan SWP D							APBN	Pemerintah pusat yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan pekerjaan umum
f	Jembatan									
	f.1 Pembangunan dan pemeliharaan jembatan	• SWP A Blok I.A.1 Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan pekerjaan umum

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
g	Pelabuhan Pengumpul									
	g.1 Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul	Pelabuhan Carocok Painan pada SWP A Blok I.A.12							APBN, APBD Provinsi	Pemerintah pusat, dan provinsi yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan perhubungan
h	Pelabuhan Perikanan									
	h.1 Pembangunan dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan	PPI Carocok Painan pada SWP A Blok I.A.9							APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perikanan
i	Terminal Khusus									
	i.1 Pembangunan dan pemeliharaan terminal khusus	SWP A Blok I.A.13							APBD Kabupaten APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi dan Daerah, yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan perhubungan
j	Terminal Penumpang Tipe B									
	j.1 Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B	Terminal Sago pada SWP C Blok I.C.4							APBD Provinsi	Pemerintah provinsi dan daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan perhubungan
k	Terminal Penumpang Tipe C									
	k.1 Kajian pembangunan terminal penumpang tipe C	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan perhubungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
I	Lintas Penyeberangan									
	I.1 pengembangan alur lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi	SWP A							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan
A.3	Perwujudan Rencana Jaringan Energi									
a	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SUTT 150 kV Incomer – Telur Sirih melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBN	PT PLN
b	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBN	PT PLN
c	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBN	PT PLN
d	Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu distribusi	- SWP A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11 dan I.A.12 - SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; dan I.B.6 - SWP C Blok I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.7 dan I.C.8; dan - SWP D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.5.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang membidangi di bidang energi dan sumber daya mineral, PT PLN
A.4	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi									
a	Jaringan Tetap									
	a.1 Pengembangan jaringan serat optik	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan telekomunikasi

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
	a.2 Pengembangan dan pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO)	STO Painan pada SWP A Blok I.A.5							APBN	Pemerintah dan pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan telekomunikasi
B	Jaringan bergerak seluler									
	b.1 Pengembangan menara Base Transceiver Station (BTS)	- SWP A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.9, I.A.10, I.A.12 - SWP B Blok I.B.1 dan I.B.4; dan - SWP C Blok I.C.3, I.C.6 dan I.C.8.							APBN, Swasta	Pemerintah dan pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan telekomunikasi
A.5	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air									
a	Bendungan									
	a.1 Pengembangan dan pemeliharaan bendungan	SWP D Blok I.D.4							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang sumberdaya air
b	Pintu Air									
	b.1 Pengembangan dan pemeliharaan pintu air	SWP A Blok I.A.11; SWP B Blok I.B.1 dan I.B.3; SWP C Blok I.C.8; dan SWP D Blok I.D.4							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang sumberdaya air
c	Sistem Jaringan Irigasi									
	c.1 Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang sumberdaya air
d	Jaringan irigasi tersier									
	d.1 Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
a	Jalur evakuasi bencana									
	a.1 Pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang kebencanaan
b	tempat evakuasi bencana									
	b.1 Pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi akhir (TEA)	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11; SWP B Blok I.B.2; SWP C Blok I.C.7.							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang kebencanaan
	b.2 Pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi sementara (TES)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.13; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang kebencanaan
c	Jalur sepeda									
	c.1 Pengembangan dan pemeliharaan Jalur sepeda	SWP A dan SWP C							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
d	Jaringan pejalan kaki									
	d.1 Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan pejalan kaki	SWP A dan SWP C							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
e	Pengaman pantai									
	e.1 Pengembangan dan pemeliharaan	SWP A, SWP B, dan SWP C							APBD	pemerintah daerah yang

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
A	Pengembangan dan pemugaran bangunan serta objek yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan	SWP A Blok I.A.13							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang kebudayaan
B	Pengembangan dan pemanfaatan ruang zona cagar budaya untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata berbasis budaya sejarah.	SWP A Blok I.A.13							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang kebudayaan
B.2	ZONA BUDIDAYA									
B.2.1	Zona Badan Jalan									
1	Pengembangan zona badan jalan	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian
B.2.2	Zona Pertanian									
A	Sub-Zona Tanaman Pangan									
1	Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada sub-zona tanaman pangan	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, I.B.4 dan Blok I.B.5; - SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani pada sub-zona tanaman pangan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, I.B.4 dan Blok I.B.5; • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian
3	Pengendalian Bencana Pertanian pada sub-zona tanaman pangan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, I.B.4 dan Blok I.B.5; • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian
B	Sub-Zona Hortikultura									
1	Penyediaan ruang untuk mengembangkan metoda pertanian hortikultura yang mengacu pada karakteristik ruang dan kawasan pada sub-zona hortikultura	• SWP B Blok I.B.5 • SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian
2	Pengendalian Bencana Hortikultura pada sub-zona hortikultura	• SWP B Blok I.B.5 • SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian
C	Sub-Zona Perkebunan									
1	Penyediaan ruang untuk mengembangkan metoda pertanian perkebunan yang mengacu pada karakteristik ruang dan kawasan pada sub-zona perkebunan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6; • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.A.6, Blok I.C.7; • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian

[illegible]

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
1	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	• SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pariwisata
2	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana prasarana pariwisata)	• SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pariwisata
3	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten/Kota (Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana prasarana pariwisata)	• SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pariwisata
4	Pengembangan zona pariwisata berbasis kewilayahan dalam suatu konsep tematik	• SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pariwisata
5	Pengembangan jalur wisata dengan menghubungkan beberapa kegiatan dan/atau zona pariwisata melalui optimalisasi dan pembukaan rute serta transportasi public	• SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pariwisata
6	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	• SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pariwisata

[illegible]

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
1	Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasan skala SWP seperti kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja/kegiatan perkantoran, tempat berusaha, tempat hiburan, wisata dan rekreasi skala pelayanan SWP yang dilayani oleh jalan kolektor dengan lebar 7 – 9m dan jalan lokal dan dilalui angkutan umum	• SWP B Blok I.B.1; • SWP C Blok I.C.4							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perdagangan
B.2.7	Zona Perumahan									
A	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang									
1	Pengembangan sub-zona perumahan kepadatan sedang dan fasilitasnya	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.5.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Developer, Masy.	pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan
2	Peningkatan nilai KDH dan pembangunan RTH pada sub-zona perumahan kepadatan sedang	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.5.							APBD Kabupaten, Developer, masy.	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan
3	Revitalisasi dan perbaikan lingkungan sub-zona perumahan kepadatan sedang yang tergolong kumuh	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di

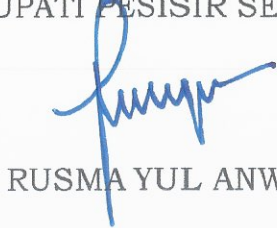
NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
		- SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.5.								bidang perumahan
B	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah									
1	Pengembangan sub-zona perumahan kepadatan rendah dan fasilitasnya	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Developer, Masy.	pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan
2	Peningkatan nilai KDH dan pembangunan RTH pada sub-zona perumahan kepadatan rendah	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.							APBD Kabupaten, Developer, Masy.	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan
C	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah									
1	Pengembangan sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah dan fasilitasnya	- SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; - SWP B Blok I.B.4; - SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5 dan Blok I.C.8; - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.4 dan Blok I.D.5.							APBD Kabupaten, Developer, Masy.	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan
2	Peningkatan nilai KDH dan pembangunan RTH pada sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah	- SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; - SWP B Blok I.B.4; - SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5 dan Blok I.C.8; - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.4 dan Blok I.D.5.							APBD Kabupaten, Developer, Masy.	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
B.2.8	Zona Perkantoran									
1	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan zona perkantoran tempat kegiatan pelayanan pemerintahan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.12; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; - SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8; - SWP D Blok I.D.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten.	pemerintah pusat dan daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
B.2.9	Zona Sarana Pelayanan Umum									
A	Sub-Zona SPU Skala Kota									
	Pengembangan ruang publik berupa fasilitas sosial, olahraga, budaya, dan serta gedung serba guna yang dapat difungsikan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi pada sub-zona SPU skala kota	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.8, dan Blok I.A.11 dan Blok I.A.12; - SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8.							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
B	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan									
	Pengembangan ruang publik berupa fasilitas sosial, olahraga, budaya, dan serta gedung serba guna yang dapat difungsikan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi pada sub-zona SPU skala kecamatan	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8; - SWP B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; - SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
C	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan									
	Pengembangan ruang publik berupa fasilitas sosial, olahraga, budaya, dan serta gedung serba guna yang dapat difungsikan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi pada sub-zona SPU skala kelurahan	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
B.2.10	Zona Ruang Terbuka Non Hijau									
	Pengembangan zona ruang terbuka non hijau (alun-alun, plaza, sarana olahraga, taman bermain rekreasi, ruang bawah jalan layang/jembatan, koridor antar bangunan, lahan parkir, dan pembatas/buffer) sebagai wadah aktivitas sosial dan budaya, rekreasi dan olahraga	SWP A Blok I.A.8							APBD Kabupaten	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
B.2.11	Zona Transportasi									
1	Pengembangan zona transportasi di daratan berupa Terminal dan pelabuhan	- SWP A Blok I.A.12, dan Blok I.A.13; - SWP C Blok I.C.4.							APBD Provinsi.	pemerintah provinsi yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan
B.2.12	Zona Peruntukan Lainnya									
A	Sub-Zona Pergudangan									
	Pembangunan dan Pengembangan zona pergudangan dan fasilitasnya	- SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; - SWP B Blok I.B.5.							APBD Kabupaten, Swasta.	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perdagangan
B.2.13	Zona Campuran									
A	Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang									
1	Pengembangan kawasan campuran hunian dan perdagangan dan jasa serta fasilitasnya pada sub-zona campuran intensitas menengah/sedang	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dan Blok I.A.11; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.							APBD Kabupaten, Swasta, Masy.	pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang perdagangan
B.2.14	Zona Pertahanan dan Keamanan									
1	Penyediaan zona pertahanan dan keamanan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemerintah dalam bidang pertahanan	- SWP A Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12; - SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.							APBN	pemerintah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertahanan dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	PJM-1					PJM-2 S.D PJM-4	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5			
	dan keamanan									keamanan
C	PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG									
1	Audit pemanfaatan ruang	• SWP A • SWP B • SWP C • SWP D							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di tata ruang
2	Penertiban pemanfaatan ruang	• SWP A • SWP B • SWP C • SWP D							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah daerah yang membindangi urusan wajib pemerintahan di tata ruang

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX)

KODE	JENIS/ KEGIATAN	ID	LINDUNG								BUDIDAYA																								
			BA	EM	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	TR	P-1	P-2	P-3	IK-1	IK-2	ANIL	W	R-3	R-4	R-5	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	PL-4	C-2	HK			
			Badan Air	Ekosistem Mangrove	Perlindungan Selempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Zona Transportasi	Sub Zona Tanaman Pangan	Sub Zona Hortikultura	Sub Zona Perkebunan	Perikanan Tangkap	Zona Perikanan Budidaya	Zona Perambangan Mineral Bukan Logam	Zona Wisata	Sub zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Sub Zona SPU Skala Kota	Sub Zona SPU Skala Kecamatan	Sub Zona SPU Skala Kelurahan/Nagari	Zona Ruang Terbuka non Hijau	Zona Pergudangan	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perumahan dan Keamatan			
011	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0112	PERTANIAN PADI	002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0113	PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI	003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T6	T6	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
01253	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	X	X	X	T6	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
01261	PERKEBUNAN BUAH KELAPA	005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6	I	I	X	X	X	T6	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1283	PERTANIAN CABAI	006	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
01285	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG	007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6	I	I	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0129	PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6	I	I	X	X	X	T6	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
013	PERTANIAN TANAMAN TUMBUH DAN PERSEBENTAK BUKAN TUMBUH	009	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	T6	I	I	X	X	X	T6	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
014	PETERNAKAN	010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6	T6	I	X	X	X	T6	T6	T6	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6	X		
01497	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET	011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6	B1	B1	X	X	X	T6	T6	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
032	PERIKANAN BUDIDAYA	012	B1, T	X	B1, I1	X	X	X	X	X	X	T6	B1	B1	X	I	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0810	PENGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	013	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
101	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X		
102	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BICRA AIR	015	X	X	T1, B3, I1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
103	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
104	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
105	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X		
106	INDUSTRI PENGOLONGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI	019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B5	T5, B1, B5	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X		
107	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
108	INDUSTRI MAKANAN HEWAN	021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
110	INDUSTRI MINUMAN	022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
139	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
141	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
142	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
143	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
151	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
152	INDUSTRI ALAS KAKI	028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
1622	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
1623	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
1629	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBUI DAN SEJENIKNYA	031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	
181	INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YSDI	032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X		
182	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	033	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T5, B1, B3	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	X		
239	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	034	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2593	INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN LAINNYA	035	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
310	INDUSTRI FURNITUR	036	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6, B3	T6, B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X		
321	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DAN BARANG BERHARGA	037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	
322	INDUSTRI ALAT MUSIK	038	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	
323	INDUSTRI ALAT OLARAHAGA	039	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	
35112	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	040	X	X	T1, B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, B3	B1	
35113	DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	041	X	X	T1, B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	T1, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, B3	B1
35114	PENJUALAN TENAGA LISTRIK	042	X	X	T1, B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, B3	B1	
35129	AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	043	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1, B3	X		

[illegible]

KODE	JENIS/ KEGIATAN	ID	LINDUNG								BUDIDAYA																					
			BA	EM	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	TR	P-1	P-2	P-3	IK-1	IK-2	MNL	W	R-3	R-4	R-6	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	PL-6	C-2	HK
			Badan Air	Ekosistem Mangrove	Perlindungan Selampai	Taman Kota	Taman Kecamatan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Zona Transportasi	Sub Zona Tanaman Pangan	Sub Zona Hortikultura	Sub Zona Perkebunan	Perikanan Tangkap	Zona Perikanan Budidaya	Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam	Zona Wisata	Sub zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Sub Zona SPU Skala Kota	Sub Zona SPU Skala Kecamatan	Sub Zona SPU Skala Kelurahan/Nagari	Zona Ruang Terbuka non Hijau	Zona Perdagangan	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perumahan dan Keamanan
45405	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	094	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
45406	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	095	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	096	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
462	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP	097	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
463	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	098	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
464	PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA	099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
465	PERDAGANGAN BESAR MEUBEL, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
469	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
471	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO	102	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T4,B3	T4,B3	X	X	T4,B3	X	X	X	X	B3	X
4721	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO	103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	104	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
4723	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
4724	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO	106	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B3	B3	B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
473	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B3	B3	B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
474	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	108	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B3	B3	B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
475	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
476	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN BELAKANG DI TOKO KHUSUS	110	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
477	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO	111	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
4771	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI BULU DI TOKO	112	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
4772	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
4773	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
4774	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO	115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	B3	X
4775	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS HEWAN PIARAAN DAN HEWAN TERNAK	116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	T1	X
4776	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA, POTONG, TANAMAN, PUPUK DAN YBDI DI TOKO	117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
4777	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, AROMATIK/PENYEGAR (MINTYAK, ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO	118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6	T6	T6	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
4778	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO	119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
4779	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YDIL	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
478	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR	121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4781	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN	122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4782	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI	123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4783	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI	124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4784	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI	125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4785	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PRIBADI	126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4786	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4787	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT CUKRABAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4788	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4789	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
479	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR	131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KODE	JENIS/ KEGIATAN	ID	LINDUNG								BUDIDAYA																						
			BA	EM	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	TR	P-1	P-2	P-3	IK-1	IK-2	ANL	W	R-3	R-4	R-5	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	PL-6	C-2	HK	
			Badan Air	Erosi/lemb Mangrove	Pelindungan Selempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Zona Transportasi	Sub Zona Tanaman Pangan	Sub Zona Hortikultura	Sub Zona Perkebunan	Perikanan Tangkap	Zona Perikanan Budidaya	Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam	Zona Wisata	Sub zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Sub Zona SPU Skala Kota	Sub Zona SPU Skala Kecamatan	Sub Zona SPU Skala Kelurahan/Kagari	Zona Ruang Terbuka non Hijau	Zona Pergudangan	Zona Campuran Intensitas sedang	Zona Perumahan dan Keamanan	
491	ANGKUTAN JALAN REL	132	B1	X	B1.B2	B1	B1	B1	B1	B1	B2	B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
492	ANGKUTAN BUS	133	X	X	B1.B2	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	B2	X	
494	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS	134	X	X	B1.B2	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	
4941	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, DALAM TRAYEK	135	X	X	B1.B2	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	
4942	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	136	X	X	B1.B2	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	
4943	ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	137	X	X	B1.B2	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	
4944	ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN DAN WISATA UNTUK PENUMPANG	138	X	X	B1.B2	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4945	ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA	139	X	X	B1.B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50112	ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG	140	X	B1.B5	B1.B2	X	X	X	X	B2	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
521	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	141	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	T1.B1	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	
522	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	142	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	
5221	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT	143	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	
52211	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	144	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52212	AKTIVITAS STASIUN KERETA API	145	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52213	AKTIVITAS JALAN TOL	146	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
52214	AKTIVITAS PERPAKURAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	147	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52215	AKTIVITAS PERPAKURAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	148	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	T4	X	X	X		
52219	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	149	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	B2	X		
52221	AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHAN LAUT	150	X	B1.B5	B1	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52224	AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN	151	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	152	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3.B3	T1	X	X	
531	AKTIVITAS POS	153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	T4.B3	T4.B3	T4.B3	X	X	X	X	X	T3.B3	B3	X	X	
532	AKTIVITAS KURIR	154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	T4.B3	T4.B3	T4.B3	X	X	X	X	X	T3.B3	B3	X	X	
551	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK	155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	T4.B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	
559	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	
561	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING	157	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6	X	X	T6	X	X	X	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X	T1	X	B1.B3	X	X	
562	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTEUTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTEUTU	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4.B3	B3	B3	B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	
5630	PENYEDIAAN MINUMAN	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56303	RUMAH MINUM/KAPE	160	X	X	B1	X	X	X	X	B1	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1	T2.B3	T2.B3	T2.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	T4.B3	X	X	B1.B3	B3	B3	X	
56304	KEDAI MINUMAN	161	X	X	B1	X	X	X	X	B1	X	B1.B3	X	X	T6	X	X	T4.B3	T2.B3	T2.B3	T2.B3	B1	B1	T4.B3	T4.B3	T4.B3	X	X	T3.B3	B3	B3	X	
56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	162	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T6	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	
56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	163	X	X	T1	T1	T1	X	X	T6	X	T1	X	X	X	T6	X	T4.B3	T4.B3	T4.B3	T4.B3	T4.B3	T4.B3	X	X	X	X	T4.B3	X	T4.B3	X	X	
581	AKTIVITAS PENERBITAN BUKU, MAJALAH DAN TERBITAN LAINNYA	164	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	
582	PENERBITAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)	165	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	
591	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	166	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	
592	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	167	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	
601	PENYIARAN RADIO	168	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	
602	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI	169	X	X	X	B5	B5	X	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	
611	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	170	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T4.B3	T4.B3	T4.B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1
612	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	171	X	X	T1.B1	X	X	B1	B1	B1	X	B1	T6	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
613	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	172	X	X	T1.B1	X	X	B1	B1	B1	X	B1	T6	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T4.B3	T4.B3	T4.B3	B1	B1	B1	B1	B1
619	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA	173	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6191	JASA NILAI TAMBAH TELEFONI	174	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	
6192	JASA MULTIMEDIA	175	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	
6199	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YDIL	176	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	X	
631	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YDIL PORTAL WEB	177	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	
639	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA	178	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	
641	PERANTARA MONETER	179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4.B3	T4.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6412	BANK UMUM	180	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4.B3	T4.B3	T3,T4,B3	X	X	X	X	X	T3,T4,B3	X	X	

[illegible]

KODE	JENIS/ KEGIATAN	ID	LINDUNG								BUDIDAYA																							
			BA	EM	PS	PTH-2	PTH-3	PTH-7	PTH-8	CB	BJ	TR	P-1	P-2	P-3	IK-1	IK-2	MNL	W	R-3	R-4	R-5	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTH	PL-6	C-2	HK		
			Badan Air	Ekosistem Mangrove	Perlindungan Selempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Pemukaman	Jalur Hijau	Gagar Budaya	Badan Jalan	Zona Transportasi	Sub Zona Tanaman Pangan	Sub Zona Hortikultura	Sub Zona Perkebunan	Perikanan Tangkap	Zona Perikanan Budidaya	Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam	Zona Wisata	Sub zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Sub zona SPU Skala Kota	Sub Zona SPU Skala Kecamatan	Sub Zona SPU Skala Kelurahan/Nagari	Zona Ruang Terbuka non Hijau	Zona Pergudangan	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perumahan dan Keamanan		
932	AKTIVITAS REKREASI LAINNYA	268	X	X	T2,B5	T2,B5	T2,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
9321	AKTIVITAS TAMAN BERIMA ATAU TAMAN HIBURAN	269	X	X	T2,B5	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2,B5	T2,B5	T2,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	X	
9322	DAYA TARIK WISATA ALAM	270	T1,T2,B1	B1,B5	T2,B5	B1	B1	X	X	T2,B1	X	X	T4,B1,B5	T4,B1,B5	B1,B5	X	B1	X	T2,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9323	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA	271	X	X	T2,B5	X	X	X	X	T2,B1	X	X	T4,B1,B5	T4,B1,B5	B1,B5	X	B1,T2	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	X
9324	WISATA TIRTA	272	T1,T2,B1	X	T2,B5	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	B1	X	X	B1,T2	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	X
9329	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	273	X	X	T2,B5	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	X
93292	KARAOKE	274	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	X
93293	USAHA ARENA PERMAINAN	275	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	X
93299	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	276	X	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X
941	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	277	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
951	REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	278	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
952	REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	279	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
961	AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA	280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
9611	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT DAN SALON KECANTIKAN	281	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	B1	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
962	AKTIVITAS PENATU	282	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	B1	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
969	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	283	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X
970	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	284	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
981	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN	285	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
982	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	286	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KETERANGAN:

- I = Izin
T = Terbatas
T1 = Dibatasi Jumlahnya
T2 = Dibatasi Jam Operasi
T3 = Dibatasi luas lantai bangunan dalam satu kavling
T4 = Dibatasi luasan kavling tertentu
T5 = Terbatas untuk industri mikro dan kecil
T6 = Terbatas untuk Eksting
- B = Bersyarat
B1 = Wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (AMDAL/UKL-UP/SPPL)
B2 = Wajib melakukan analsi dampak lalu lintas (Andalal)
B3 = wajib menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan
B4 = Pengembangan penyediaan fasilitas publik atau perumahan untuk MBR
B5 = Memperoleh persetujuan dari instansi terkait
- X = Tidak diizinkan



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 – 2043

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang WP Perkotaan Painan

NO	RENCANA POLA RUANG	KODE ZONA	KODE SUB ZONA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		
				KDB Maks	KLB Maks	KDH Min
A	ZONA LINDUNG					
1	Zona Badan Air	BA		-	-	-
2	Zona Perlindungan Setempat	PS		-	-	90%
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH				
	Sub-zona Taman Kota		RTH-2	10%	0,1	90%
	Sub-zona Taman Kecamatan		RTH-3	20%	0,2	80%
	Sub-zona Pemakaman		RTH-7	30%	0,3	75%
	Sub-zona Jalur Hijau		RTH-8	-	-	100%
4	Zona Ekosistem Mangrove	EM		-	-	-
5	Zona Cagar Budaya	CB		10%	0,1	85%
B	ZONA BUDIDAYA					
1	Zona Badan Jalan	BJ		-	-	-
2	Zona Pertanian	P				
	Sub-zona Tanaman Pangan		P-1	-	-	100%
	Sub-zona Holtikultura		P-2	10%	0,1	85%
	Sub-zona Perkebunan		P-3	20%	0,2	75%
3	Zona Perikanan	IK				
	Sub-zona Perikanan Tangkap		IK-1	40%	0,4	25%
	Sub-zona Perikanan Budidaya		IK-2	25%	0,25	25%
4	Zona Pertambangan	T				
	Sub-zona Pertambangan Mineral Bukan Logam		MNL	10%	0,1	25%
5	Zona Pariwisata	W		60%	2,4	20%
6	Zona Perumahan	R				
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang		R-3	60%	1,2	10%
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah		R-4	50%	1	25%
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah		R-5	40%	0,8	30%
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU				
	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota		SPU-1	70%	2,8	15%
	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan		SPU-2	60%	2,4	20%
	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan		SPU-3	50%	1	25%
8	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		20%	0,2	10%
9	Zona Campuran	C				
	Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang		C-2	70%	2,8	10%
10	Zona Perdagangan dan Jasa	K				
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP		K-2	70%	4,2	5%
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		K-3	60%	2,4	10%
11	Zona Perkantoran	KT		50%	2,0	25%
12	Zona Transportasi	TR		30%	0,6	20%
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK		50%	2	30%
14	Zona Peruntukan Lainnya	PL				
	Sub-zona Pergudangan		PL-6	60%	1,2	20%

Ketentuan Tata Bangunan WP Perkotaan Painan

NO	RENCANA POLA RUANG	KODE ZONA	KODE SUB ZONA	GARIS SEMPADAN BANGUNAN Min. (m)				JARAK BEBAS SAMPING Min. (m)				JARAK BEBAS BELAKANG Min. (m)				KETINGGIAN BANGUNAN Maks.(m)	JUMLAH LANTAI Maks.
				Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk.	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk.	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk.		
A	ZONA LINDUNG																
1	Zona Badan Air	BA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zona Perlindungan Setempat	PS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Zona RTH	RTH															
	Sub-zona Taman Kota		RTH-2	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5	6	1
	Sub-zona Taman Kecamatan		RTH-3	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5	6	1
	Sub-zona Pemakaman		RTH-7	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5	6	1
	Sub-zona Jalur Hijau		RTH-8	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5	-	-
4	Zona Ekosistem Mangrove	EM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Zona Cagar Budaya	CB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	menyesuaikan jenis cagar budaya	
B	ZONA BUDIDAYA																
1	Zona Badan Jalan	BJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zona Pertanian	P															
	Sub-zona Tanaman Pangan		P-1	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5	-	-
	Sub-zona Hortikultura		P-2	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5	6	1
	Sub-zona Perkebunan		P-3	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5	6	1
3	Zona Perikanan	IK															
	Sub-zona Perikanan Tangkap		IK-1													6	1
	Sub-zona Perikanan Budidaya		IK-2	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5	6	1
4	Zona Pertambangan	T															
	Sub-zona Pertambangan Mineral Bukan Logam		MNL	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5	6	1
5	Zona Pariwisata	W														24	4
6	Zona Perumahan	R															
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang		R-3	20	10	5	3	5	3	2	1	2	2	2	1	12	2
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah		R-4	20	10	5	3	5	3	2	1	2	2	2	1	12	2
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah		R-5	20	10	6	3	5	3	2	1	2	2	2	1	12	2

7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU																
	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	20	10	6	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1		24	4
	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	20	10	6	3	3	3	2	1	2	2	2	1		24	4	
	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	20	10	6	3	3	3	2	1	2	2	2	1		12	2	
8	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5		6	1	
9	Zona Campuran	C																
	Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	20	7	5	3	3	0	1	2	5	5	3	2		24	4	
10	Zona Perdagangan dan Jasa	K																
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	20	7	5	3	0	0	1	2	2	2	2	2		36	6	
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	20	10	5	3	3	1	1	2	2	2	2	2		24	4	
			20	10	6	3	3	3	2	2	2	2	2	2		24	4	
11	Zona Perkantoran	KT	20	10	6	3	3	3	2	2	2	2	2	2		24	4	
12	Zona Transportasi	TR	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5		12	2	
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	20	10	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3		24	4	
14	Zona Peruntukan Lainnya	PL																
	Sub-zona Pergudangan	PL-6	20	10	6	3	10	5	5	5	5	5	5	5		12	2	



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 – 2043

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum WP Perkotaan Painan

NO	RENCANA POLA RUANG	KODE ZONA SUB ZONA		PRASARANA DAN SARANA	KETENTUAN MINIMUM
A	ZONA LINDUNG				
1	Zona Badan Air	BA			-
2	Zona Perlindungan Setempat	PS		Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 2 meter beserta fasilitasnya seperti lampu jalan, tempat duduk, bolar dan jalur hijau serta rambu evakuasi bencana.
				Utilitas Perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
				Prasarana Lingkungan	tersedia tempat sampah dengan volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan anorganik serta terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
3	Zona Ruang Terbuka Hijau Sub-zona Taman Kota	RTH			
			RTH-2	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 2 meter beserta fasilitasnya seperti lampu jalan, tempat duduk, bolar dan jalur hijau serta rambu evakuasi bencana.
				Utilitas Perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tersedia tempat sampah dengan volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan anorganik serta terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah. Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan, dan penyediaan lahan parkir umum sesuai
	Sub-zona Taman Kecamatan		RTH-3	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 2 meter beserta fasilitasnya seperti lampu jalan, tempat duduk, bolar dan jalur hijau serta rambu evakuasi bencana.
				Utilitas Perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran

				Prasarana Lingkungan	tersedia tempat sampah dengan volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan anorganik serta terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah. Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan, dan penyediaan lahan parkir umum sesuai
	Sub-zona Pemakaman		RTH-7	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan pejalan kaki beserta fasilitasnya seperti lampu jalan, tempat duduk, bola dan jalur hijau serta rambu evakuasi bencana.
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10%
				Utilitas Perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tersedia tempat sampah dengan volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan anorganik serta terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah. Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan, dan penyediaan lahan parkir umum sesuai
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas peribadatan
	Sub-zona Jalur Hijau		RTH-8	Utilitas Perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
4	Zona Ekosistem Mangrove	EM			disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
5	Zona Cagar Budaya	CB		Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan pejalan kaki beserta fasilitasnya seperti lampu jalan, tempat duduk, bola dan jalur hijau serta rambu evakuasi bencana.
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10%
				Utilitas Perkotaan	Tersedia air bersih
				Prasarana Lingkungan	Tersedia tempat sampah
				Fasilitas Pendukung	Tempat evakuasi sementara
	B ZONA BUDIDAYA				
1	Zona Badan Jalan	BJ		Utilitas perkotaan	Penerangan jalan setiap 30 m serta terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tersedia tempat sampah dengan volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan anorganik serta terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah.
2	Zona Pertanian	P			
	Sub-zona Tanaman Pangan		P-1	Utilitas perkotaan	jalan usaha tani dan jaringan irigasi.
				Prasarana Lingkungan	tersedia tempat sampah dengan volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan anorganik serta terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah.
	Sub-zona Hortikultura		P-2	Utilitas perkotaan	jalan usaha tani dan jaringan irigasi.
				Prasarana Lingkungan	tersedia tempat sampah dengan volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan anorganik serta terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah.
	Sub-zona Perkebunan		P-3	Utilitas perkotaan	jalan usaha tani dan jaringan irigasi.

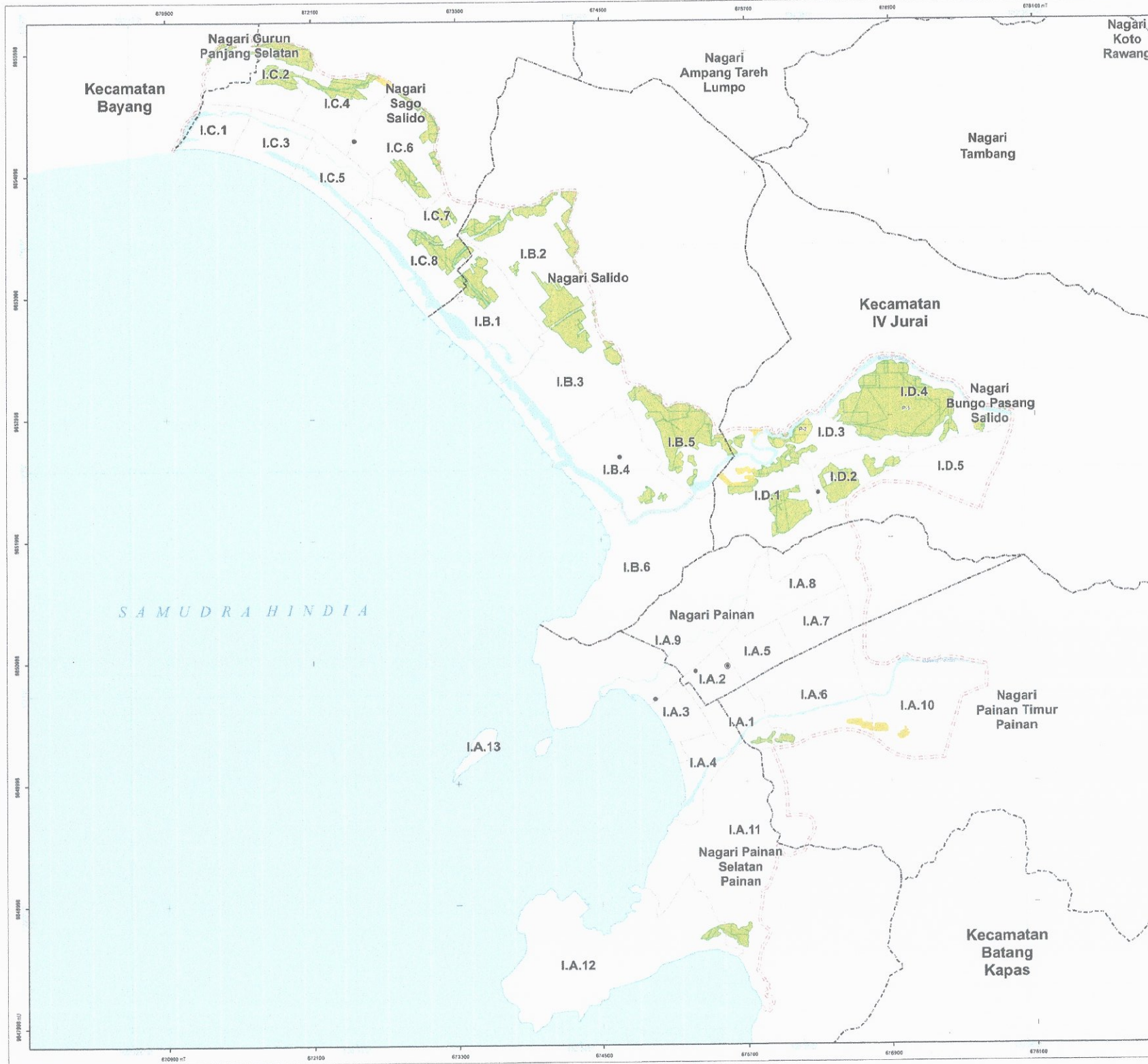
				Prasarana Lingkungan	tersedia tempat sampah dengan volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan anorganik serta terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah.
3	Zona Perikanan	IK			
	Sub-zona Perikanan Tangkap		IK-1	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan area parkir minimal 100 m2 serta instalasi pemanenan air hujan.
	Sub-zona Perikanan Budidaya		IK-2	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan area parkir minimal 100 m2 serta instalasi pemanenan air hujan.
4	Zona Pertambangan	T			
	Sub-zona Pertambangan Mineral Bukan Logam		MNL		<i>disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan</i>
5	Zona Pariwisata	W		Jaringan pejalan kaki	jalur kendaraan, Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 2,5 meter dilengkapi lampu penerangan jalan dan vegetasi peneduh
				ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi hotel atau penginapan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, area parkir sesuai standar serta instalasi pemanenan air hujan.
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas perdagangan
6	Zona Perumahan	R			
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang		R-3	ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai

				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, Parkir pribadi minimal 15 m2, disarankan memiliki sumur resapan dan atau biopori
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas perdagangan yang bisa ditempuh dalam waktu 5 menit
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah		R-4	ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, Parkir pribadi minimal 15 m2, disarankan memiliki sumur resapan dan atau biopori
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas perdagangan yang bisa ditempuh dalam waktu 5 menit
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah		R-5	ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, Parkir pribadi minimal 15 m2, disarankan memiliki sumur resapan dan atau biopori
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas perdagangan yang bisa ditempuh dalam waktu 5 menit
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU			
	Sub-zona SPU Skala Kota		SPU-1	ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 20% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai

				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi, tersedia lahan parkir sesuai standar, dan memiliki sumur resapan dan atau biopori
				Fasilitas Pendukung	disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan		SPU-2	ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 20% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi, tersedia lahan parkir sesuai standar, dan memiliki sumur resapan dan atau biopori
				Fasilitas Pendukung	disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
	Sub-zona SPU Skala Kelurahan		SPU-3	ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi, tersedia lahan parkir sesuai standar, dan memiliki sumur resapan dan atau biopori
				Fasilitas Pendukung	disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
8	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		Jaringan pejalan kaki	Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 2,5 meter dilengkapi lampu penerangan jalan, tempat duduk dan vegetasi peneduh
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi, tersedia lahan parkir sesuai standar, dan memiliki sumur resapan dan atau biopori

9	Zona Campuran	C	C-2		
	Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang			Jaringan pejalan kaki	jalur kendaraan, Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 2,5 meter dilengkapi lampu penerangan jalan dan vegetasi peneduh
				ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, area parkir sesuai standar serta instalasi pemanenan air hujan.
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan dan fasilitas peribadatan
10	Zona Perdagangan dan Jasa	K	K-2		
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP			Jaringan pejalan kaki	Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 2,5 meter dilengkapi lampu penerangan jalan dan vegetasi peneduh
				ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, area parkir sesuai standar serta instalasi pemanenan air hujan.
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan dan fasilitas peribadatan
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		K-3	Jaringan pejalan kaki	Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 2,5 meter dilengkapi lampu penerangan jalan dan vegetasi peneduh
				ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, area parkir sesuai standar serta instalasi pemanenan air hujan.

				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan dan fasilitas peribadatan
11	Zona Perkantoran	KT		ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 25% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, instalasi pemanenan air hujan, dan area parkir umum sesuai standar.
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan dan fasilitas peribadatan
12	Zona Transportasi	TR		ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 10% dalam bentuk buffer zone
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, instalasi pemanenan air hujan, dan area parkir umum sesuai standar.
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan dan fasilitas peribadatan
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK		ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 20% dalam bentuk buffer zone
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, instalasi pemanenan air hujan, dan area parkir umum sesuai standar.
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan dan fasilitas peribadatan
14	Zona Peruntukan Lainnya	PL			
	Sub-zona Pergudangan		PL-6	ruang terbuka hijau	RTH privat minimal 20% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan diatas satu lantai
				Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan. Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
				Prasarana Lingkungan	tempat sampah dan terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah, terlayani IPAL komunal skala blok, memiliki bak septik pribadi atau komunal jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, rambu evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara, area parkir sesuai standar serta instalasi pemanenan air hujan.
				Fasilitas Pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan dan fasilitas peribadatan





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IX.A
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

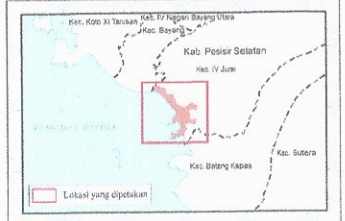
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

U
0 0,25 0,5 1 Km

SKALA : 1:15.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ● Ibukota Kabupaten/Kota ● Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Wilayah	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Wilayah	Batas Perencanaan --- Batas VP --- Batas SWVP --- Batas Blok
--	--	--

Perairan
Garis Pantai
Batas Air

**RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA**
Zona Pertanian
P1 Tanaman Pangan
P2 Hortikultura

**KETENTUAN KHUSUS
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi

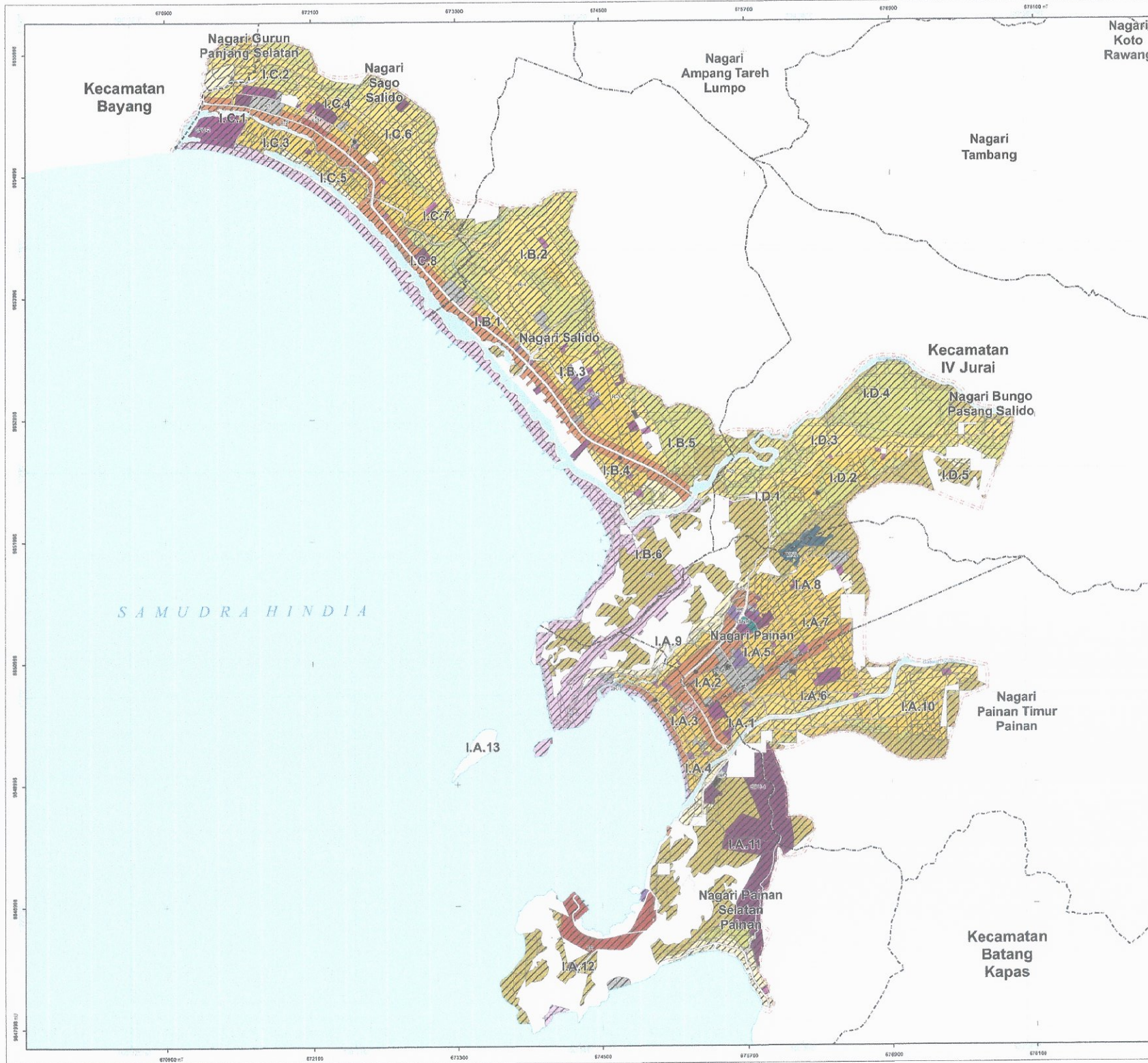
VP	VP
SWVP	SWVP
BK	BK

SUMBER DATA DAN BAWAH PETA :

- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017-2030
- Catatan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017-2030
- Peraturan yang mengatur tata ruang dan informasi geospasial (BIG) tahun 2022
- Peraturan yang mengatur tata ruang dan informasi geospasial (BIG) tahun 2022
- Lampiran II Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1598/KC/HK/2020/2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini dibuat berdasarkan data yang ada dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan administrasi.

Pengetahui,
BUPATI PESISIR SELATAN
Risma Yuli Alwar





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IX.B
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

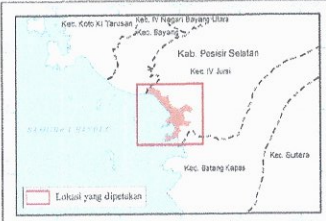
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

U
0 0,25 0,5 1 Km

SKALA : 1:15.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ● Ibukota Kabupaten/Kota ● Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Nagari	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Nagari	Batas Perencanaan --- Batas VOP --- Batas SWP --- Batas Blok
---	---	--

Perairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air

**RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA**

Zona Perumahan I.C.2 Perumahan Kepadatan Sedang I.C.4 Perumahan Kepadatan Rendah I.C.6 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Zona Perdagangan dan Jasa I.B.1 Perdagangan dan Jasa Skala WP I.B.3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Sarana Pelayanan Umum I.A.1 SPU Skala Kota I.A.2 SPU Skala Kecamatan I.A.3 SPU Skala Kelurahan	Zona Perkantoran I.A.4 Perkantoran	Zona Pertanian I.A.5 Tanaman Pangan I.A.6 Hortikultura I.A.7 Perkebunan
Zona Perikanan I.D.1 Perikanan Tangkap I.D.2 Perikanan Budi Daya	Zona Pariwisata I.D.3 Pariwisata	Zona Campuran I.D.4 Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Zona Pertambangan I.D.5 Pertambangan Mineral Bukan Logam	Zona Ruang Terbuka Non Hijau I.A.8 Ruang Terbuka Non Hijau
Zona Pertahanan dan Keselamatan I.A.9 Pertahanan dan Keselamatan	Zona Transportasi I.A.10 Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya I.A.11 Peruntukan Lainnya		

**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana**
I.A.12 Kawasan Rawan Bencana

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

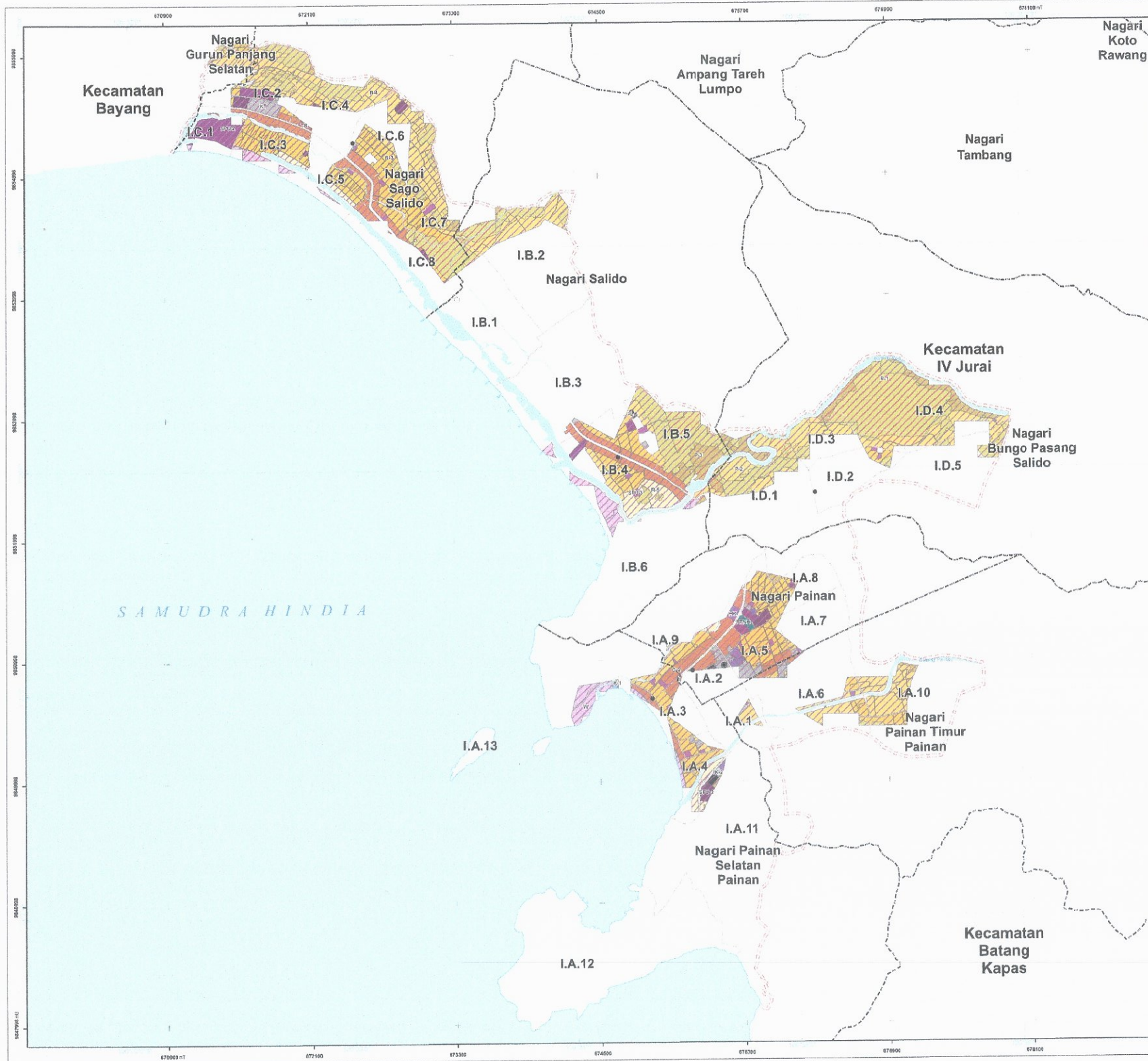
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2040
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR1) Platades perikaman tahun 2018
3. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Penetapan dan Pengesahan Batas Nagari Kecamatan IV Jurai tahun 2021
5. www.bpt.go.id
6. Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini hanya bersifat rancangan dan belum memiliki kekuatan hukum.

Mengesahkan,
BUPATI PESISIR SELATAN
Rusli Yul Alwar







PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IX.B.1
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
RAWAN BENCANA BANJIR**

U
SKALA : 1:15.000
0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Desa/Nagari	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Nagari	Batas Perencanaan --- Batas WVP --- Batas SWMP --- Batas DOK
--	---	--

Perairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan
X1 Perumahan Kepadatan Sedang
X4 Perumahan Kepadatan Rendah
X5 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah
Zona Sarana Pelayanan Umum
S04 SPU Skala Kota
S06 SPU Skala Kecamatan
S07 SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran
K01 Perkantoran
Zona Pertanian
P01 Tanaman Pangan
P02 Hortikultura
P03 Perikanan
Zona Perikanan
P04 Perikanan Tangkap
P05 Perikanan Budi Daya
Zona Pariwisata
P06 Pariwisata
Zona Campuran
C01 Campuran Intensitas Menengah/Sedang
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
R01 Ruang Terbuka Non Hijau
Zona Pertahanan dan Keamanan
K02 Pertahanan dan Keamanan
Zona Transportasi
T01 Transportasi
Zona Peruntukan Lainnya
B01 Pergudangan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana
R01 Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
R02 Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

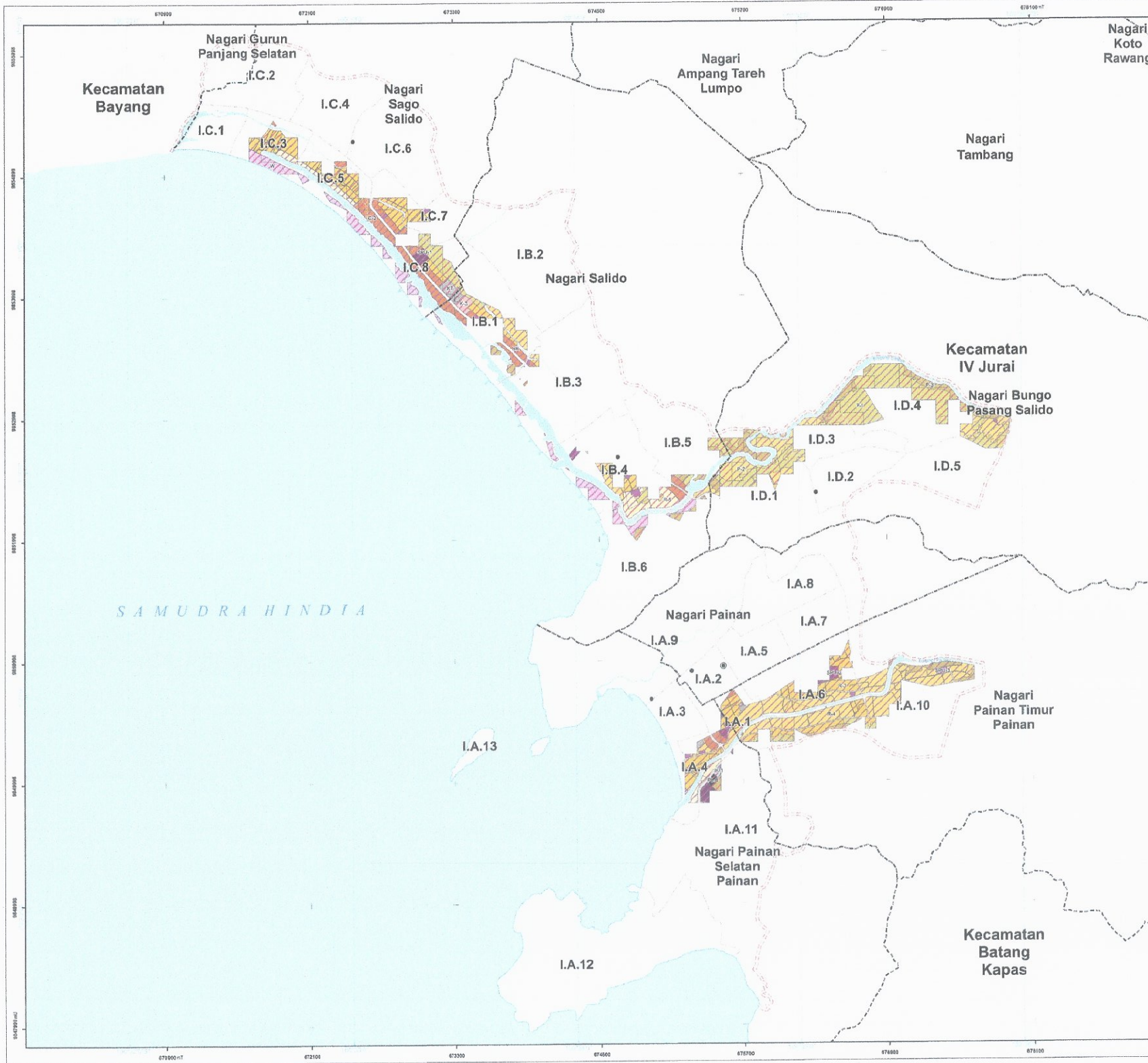
Penjelasan Kode Lokasi
GWP
SWMP
DOK

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022-2030
2. Citra Satelit Rengas (CitraSat) dengan periode pemotretan tahun 2019
3. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Penetapan dan Pengakuan Batas Nagari Kecamatan IV Jurai Tahun 2021
5. Inisiasi Inpres 2021
6. Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini bersifat referensi, hasil pengolahan data administratif

Mendatuh
BUPATI PESISIR SELATAN
Ruhma Yul Anwar







PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IX.B.2
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

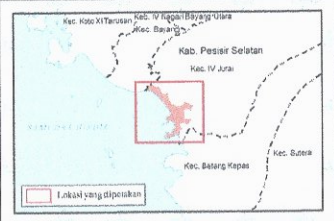
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG**

SKALA : 1:15.000

0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Goid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ● Ibukota Kabupaten/Kota ● Rukota Kecamatan ● Rukota Desa/Nagari	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Nagari	Batas Perencanaan --- Batas SVP --- Batas Bloh
---	---	---

Perairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air

**RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA**

Zona Perumahan [P1] Perumahan Kepadatan Sedang [P2] Perumahan Kepadatan Rendah [P3] Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Zona Pertanian [T1] Tanaman Pangan [T2] Hortikultura [T3] Perkebunan
Zona Perdagangan dan Jasa [J1] Persebaran dan Jasa Skala SVP [J2] SPU Skala Kota [J3] SPU Skala Kecamatan [J4] SPU Skala Kelurahan	Zona Perikanan [K1] Perikanan Budi Daya [K2] Perikanan
Zona Sarana Pelayanan Umum [U1] Perkantoran	Zona Pariwisata [P1] Pariwisata
Zona Perkantoran [K1] Perkantoran	Zona Campuran [C1] Campuran Intensitas Menengah/Sedang
	Zona Pertahanan dan Keamanan [P1] Pertahanan dan Keamanan
	Zona Perumtukan Lainnya [L1] Pengudungan

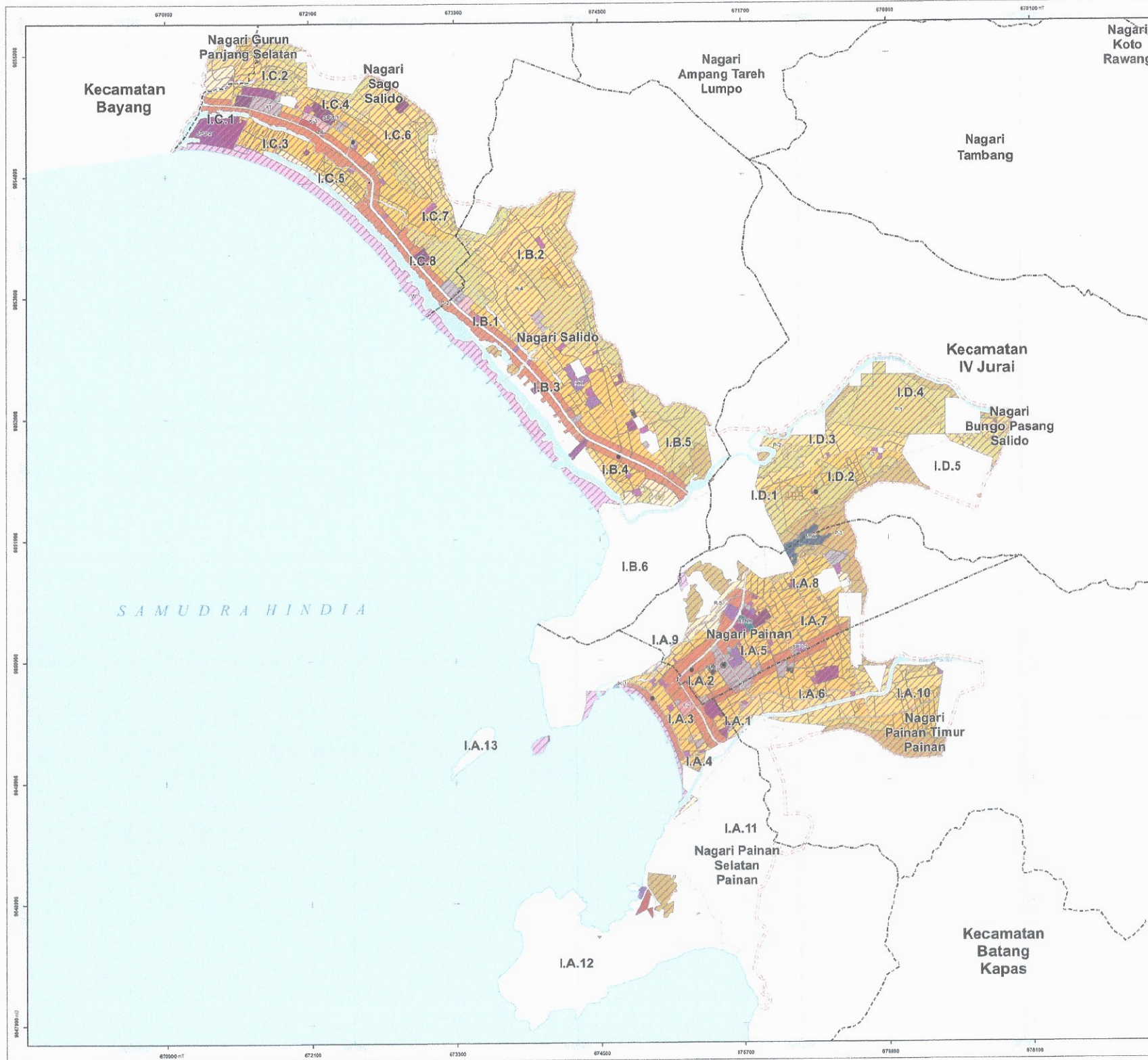
**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana**
[R1] Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang
[R2] Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi
[Kode] [Desa/Nagari] [Blok]

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2032
2. Cita Satelit Resolusi 30m (C30) Peta Dasar Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019
3. Peta Dasar yang telah direvisi dengan informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pendataan dan Pengukuran Batas Ragan Kecamatan IV Jurai tahun 2021
5. Hasil pengkajian
6. Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi.

Mengetahui
BUPATI PESIR SELATAN
Rozalia Yuli Anwar





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

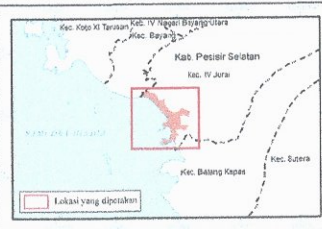
LAMPIRAN IX.B.4
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
RAWAN BENCANA GEMPA BUMI**

U
SKALA : 1:15.000
0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ● Bukota Kabupaten/Kota ● Bukota Kecamatan ● Bukota Desa/Nagari	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Nagari	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
--	---	---

Perairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan
A3 Perumahan Kepadatan Sedang
A4 Perumahan Kepadatan Rendah
A6 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah
Zona Perdagangan dan Jasa
C2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
C3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Sarana Pelayaran Umum
S101 SPU Skala Kota
S102 SPU Skala Kecamatan
S103 SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran
K101 Perkantoran
Zona Pertanian
P1 Tanaman Pangan
P2 Hortikultura
P3 Perikanan
Zona Perikanan
P4 Perikanan Tangkap
Zona Pariwisata
P5 Pariwisata
Zona Campuran
C1 Campuran Intensitas Menengah/Sedang
Zona Pertambangan
T1 Pertambangan Mineral Bukan Logam
T2 Ruang Terbuka Non Hijau
Zona Pertahanan dan Keamanan
K1 Pertahanan dan Keamanan
Zona Transportasi
T1 Transportasi
Zona Peruntukan Lainnya
L1 Pergudangan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana
R1 Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
R2 Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

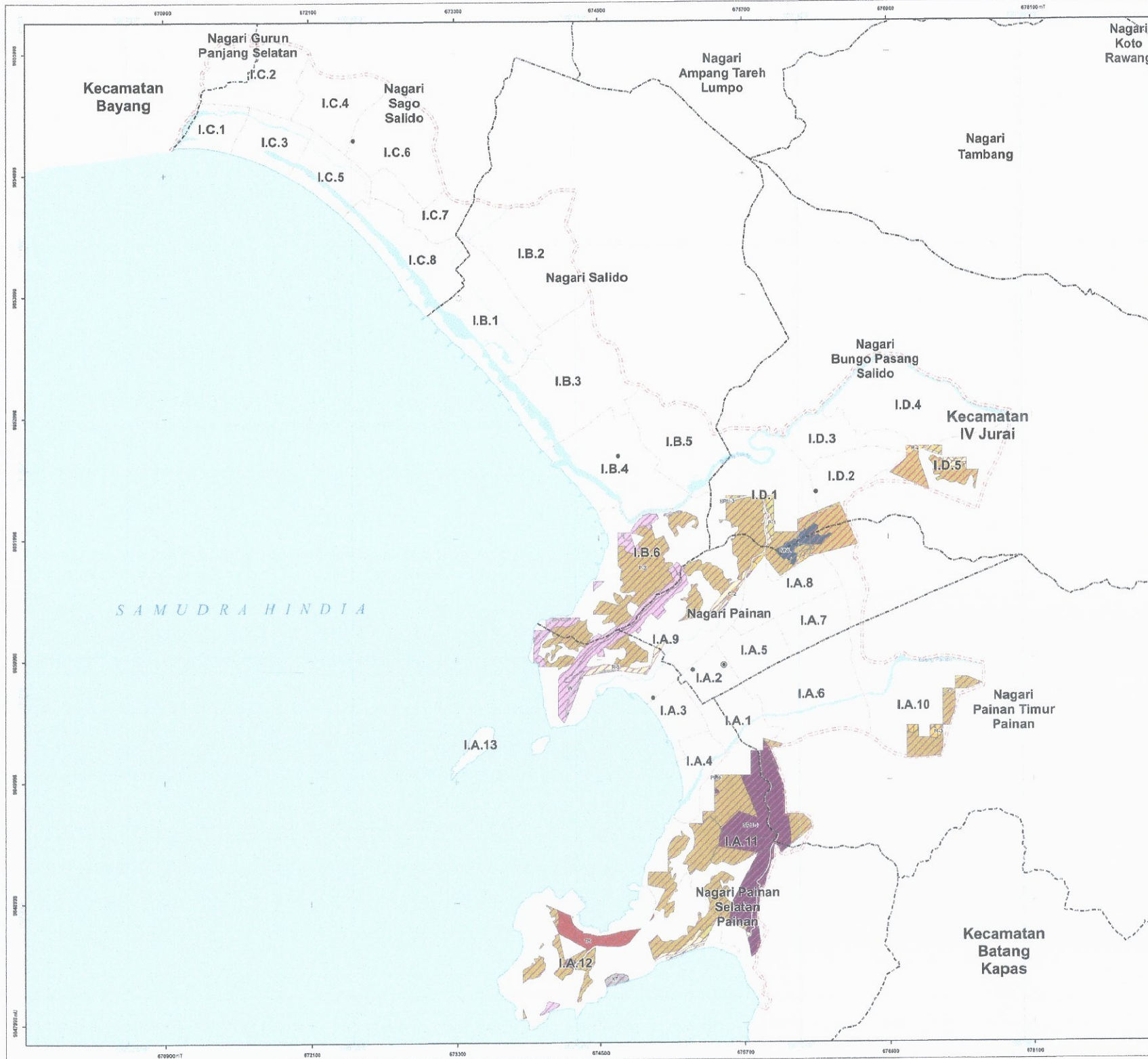
SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RT/RW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2020
2. Data Sensus Penduduk Tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010)
3. Data Sensus Penduduk Tahun 2020 (Sensus Penduduk 2020)
4. Data Sensus Penduduk Tahun 2020 (Sensus Penduduk 2020)
5. Data Sensus Penduduk Tahun 2020 (Sensus Penduduk 2020)
6. Data Sensus Penduduk Tahun 2020 (Sensus Penduduk 2020)

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai tata ruang kota.

Mengetahui,
BUPATI PESISIR SELATAN



Rusma Yuli Arwani





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

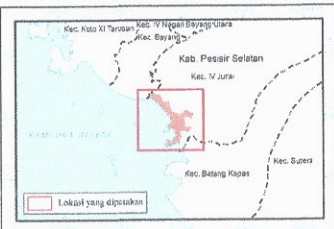
LAMPIRAN IX.B.5
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR**

U
SKALA : 1:15.000
0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ● Ibukota Kabupaten/Kota ● Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Nagari	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Nagari	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
---	---	---

Perairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan
1. Perumahan Kepadatan Sedang
2. Perumahan Kepadatan Rendah
3. Perumahan Kepadatan Sangat Rendah
Zona Sarana Pelayanan Umum
4. SPU Skala Kota
5. SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran
6. Perkantoran
Zona Pertanian
7. Tanaman Pangan
8. Perkebunan
Zona Perikanan
9. Perikanan Budi Daya
Zona Pariwisata
10. Pariwisata
Zona Campuran
11. Campuran Intensitas Menengah/Berat
Zona Pertambangan
12. Pertambangan Mineral Bukan Logam
Zona Transportasi
13. Transportasi
Zona Peruntukan Lainnya
14. Pergudangan

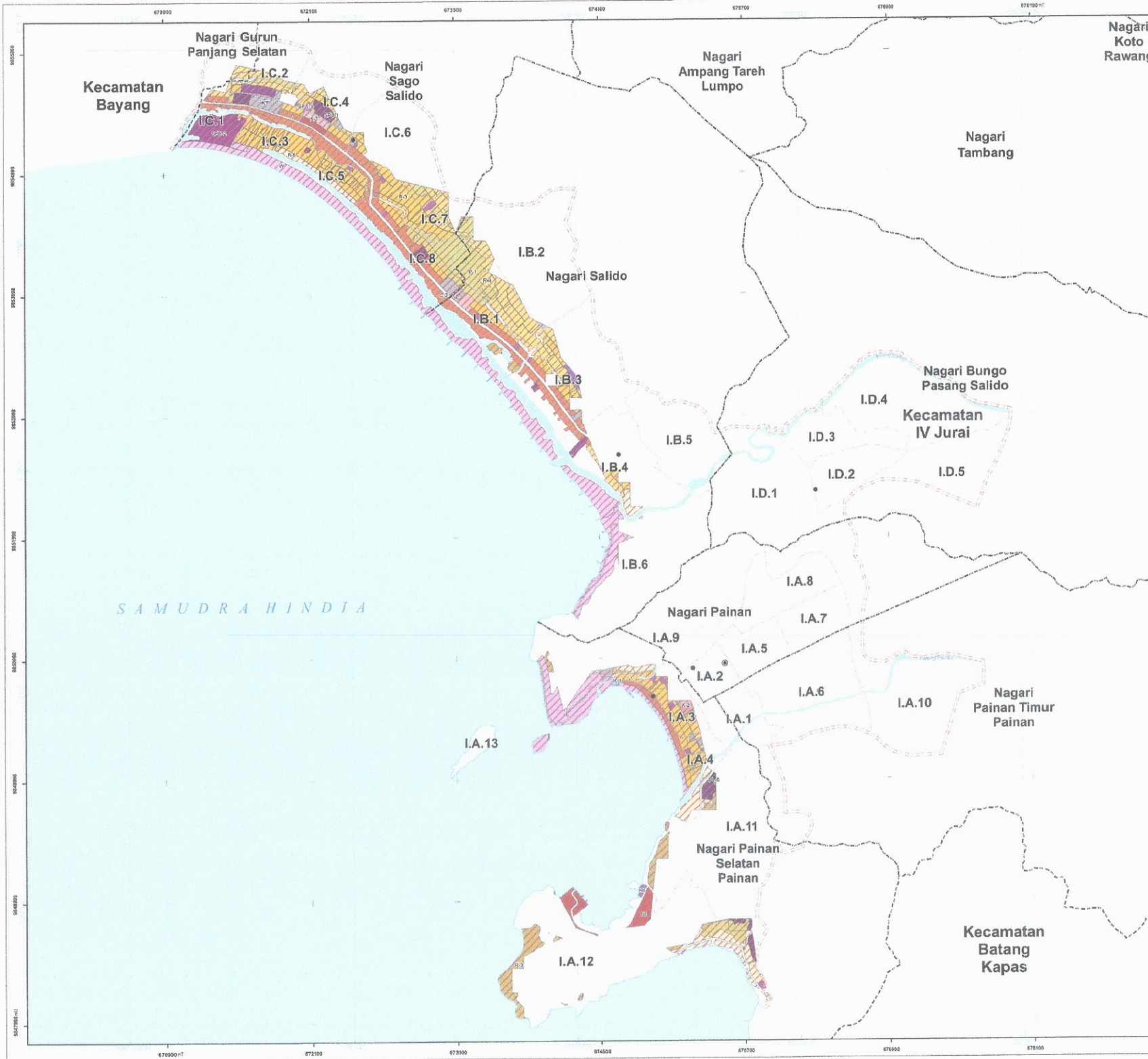
KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana
1. Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Sedang
2. Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

SUMBER DATA DAN EWAYAP PETA
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030
2. Citra Aerial Regional Tinggi (CART) Pesisir selatan tahun 2019
3. Peta dasar yang telah terverifikasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Penelitian dan Pengawasan Batas Nagari Kecamatan IV Jurai tahun 2021
5. Hasil ukur di lapangan
6. Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai data-data yang administratif

Disetujui
BUPATI PESISIR SELATAN
Rusma Yuli Anwar

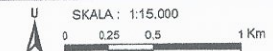


Nagari Koto Rawang



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN I.X.B.6
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
RAWAN BENCANA TSUNAMI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---|---|--|
| ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten/Kota
● Ibukota Kecamatan
● Ibukota Desa/Nagari | Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Nagari | Batas Perencanaan
--- Batas WVP
--- Batas SVP
--- Batas Blok |
|---|---|--|
- Parairan**
● Galis Pantai
--- Badan Air
- RENCANA POLA RUANG**
ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan
[X.3] Perumahan Kepadatan Sedang
[X.4] Perumahan Kepadatan Rendah
[X.5] Perumahan Kepadatan Sangat Rendah
Zona Perdagangan dan Jasa
[X.2] Perdagangan dan Jasa Skala WVP
[X.1] Perdagangan dan Jasa Skala SVP
Zona Sarana Pelayanan Umum
[S.1] SPU Skala Kota
[S.2] SPU Skala Kecamatan
[S.3] SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran
[K.1] Perkantoran **Zona Pertanian** [P.1] Tanaman Pangan [P.2] Perkebunan **Zona Perikanan** [I.1] Perikanan Tangkap **Zona Pariwisata** [W.1] Pariwisata **Zona Campuran** [C.1] Campuran Intensitas Menengah/Sedang **Zona Pertahanan dan Keamanan** [M.1] Pertahanan dan Keamanan **Zona Transportasi** [T.1] Transportasi **Zona Peruntukan Lainnya** [B.1] Pergudangan |

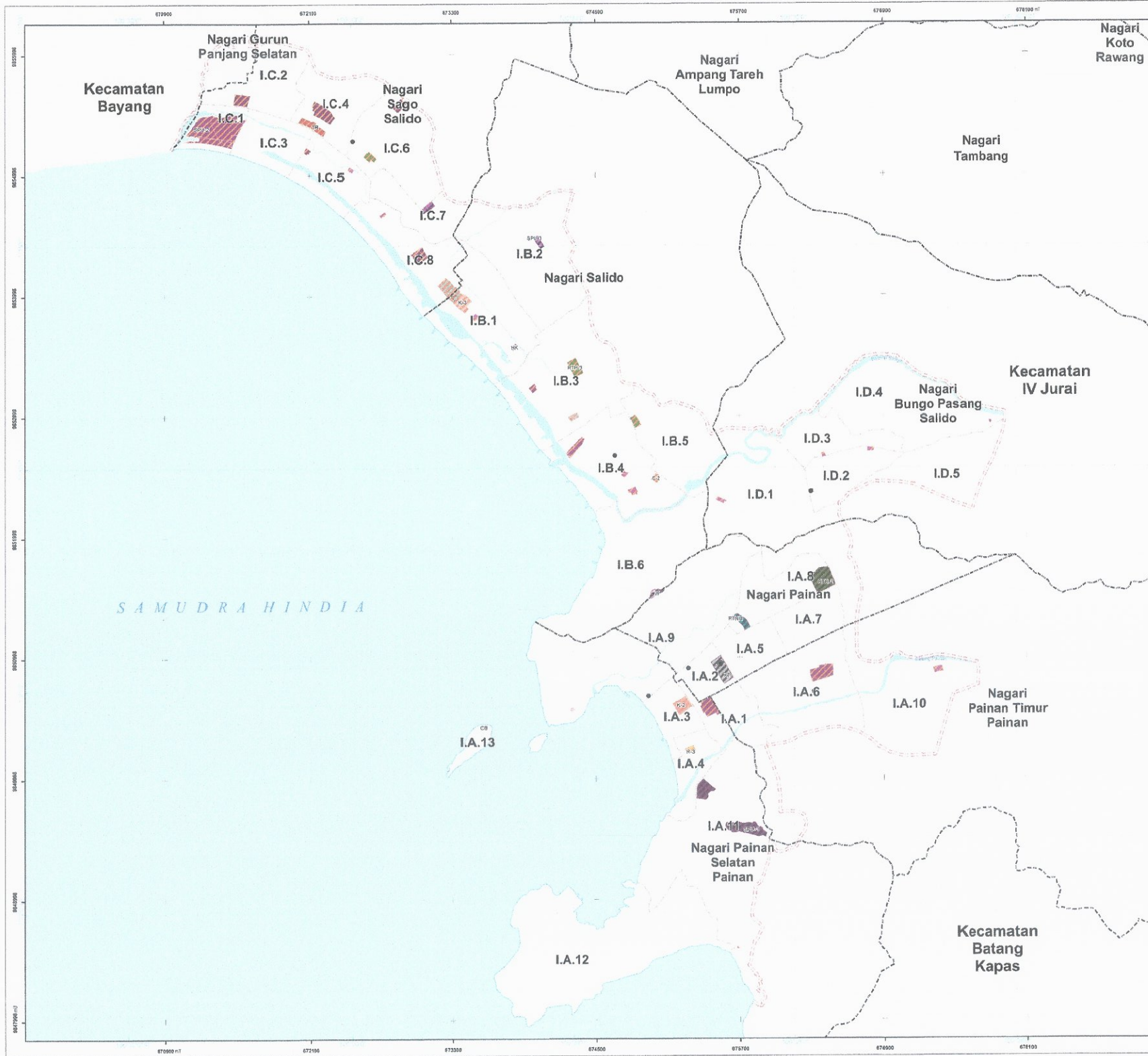
KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana
[R.1] Rawan Bencana Tsunami Tingkat Sedang
[R.2] Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi
WVP
SVP
Blok

SUMBER DATA DAN SWAYAT PETA
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2030
2. Data Sateo Rengas Tinggi (CSRT) Pesisir Sumatera tahun 2019
3. Data Bagan yang telah terotensi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Perencanaan dan Penetapan Batas Nagari Kecamatan IV Juru tahun 2021
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021
6. Peraturan Daerah tahun 2022-2023

CATATAN :
Peta ini akan diterbitkan dengan memperhatikan perubahan administrasi.
Mengetahui,
BUPATI PESISIR SELATAN
Ruma Yel Anwar





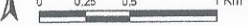


PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IX.C
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

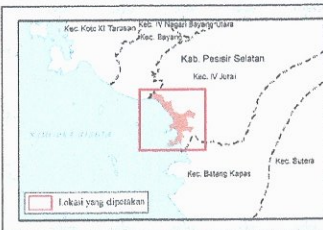
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA : 1:15.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas WP
● Ibukota Kecamatan	--- Batas SVP
● Ibukota Desa/Nagari	--- Batas Blok

Perairan

- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

- Zona Cagar Budaya
- Zona Ruang Terbuka Hijau
- Taman Kota
- Taman Kecamatan

ZONA BUDI DAYA

- Zona Perumahan
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Zona Perdagangan dan Jasa
- Perdagangan dan Jasa Skala WP
- Perdagangan dan Jasa Skala SVP
- Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU Skala Kota
- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala Kelurahan
- Zona Perkantoran
- Perkantoran

Zona Pariwisata

- Parwisata
- Zona Campuran
- Campuran (transisi Menengah/Badan)
- Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Ruang Terbuka Non Hijau
- Zona Pertahanan dan Keamanan
- Pertahanan dan Keamanan
- Zona Transportasi
- Transportasi

KETENTUAN KHUSUS

- Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir

Penjelasan Kode Lokasi

WP	WP
SVP	SVP
Blok	Blok

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (SRT) Planetes penekanan tahun 2021
- Peta Dasar yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengukuran dan Pengawasan Batas Nagari Kecamatan IV Jurai tahun 2021
- Pengukuran tahun 2022-2023

CATATAN :

Peta ini bukan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum administratif.

Yangtelah,
BUPATI PESIR SELATAN
Rusma Yuli Anwar



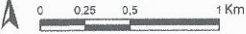


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IX.D
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043

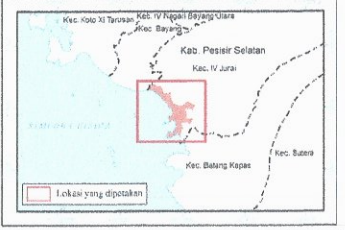
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**

SKALA : 1:15.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Batas Perencanaan
 Ibukota Kabupaten/Kota	 Batas Kecamatan	 Batas WVP
 Ibukota Kecamatan	 Batas Desa/Nagari	 Batas SVP
 Ibukota Desa/Nagari		 Batas Blok

Perairan

-  Garis Pantai
-  Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Perumahan

-  P1 Perumahan Kepadatan Sedang
-  P2 Perumahan Kepadatan Rendah
-  P3 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah

Zona Sarana Pelayaran Umum

-  SPU Skala Kecamatan
-  SPU Skala Kelurahan

Zona Perkantoran

-  K1 Perkantoran

Zona Pertanian

-  T1 Tanaman Pangan
-  T2 Hortikultura

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan

-  Sempadan Pantai
-  Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

VP	WVP
Sub	Blok

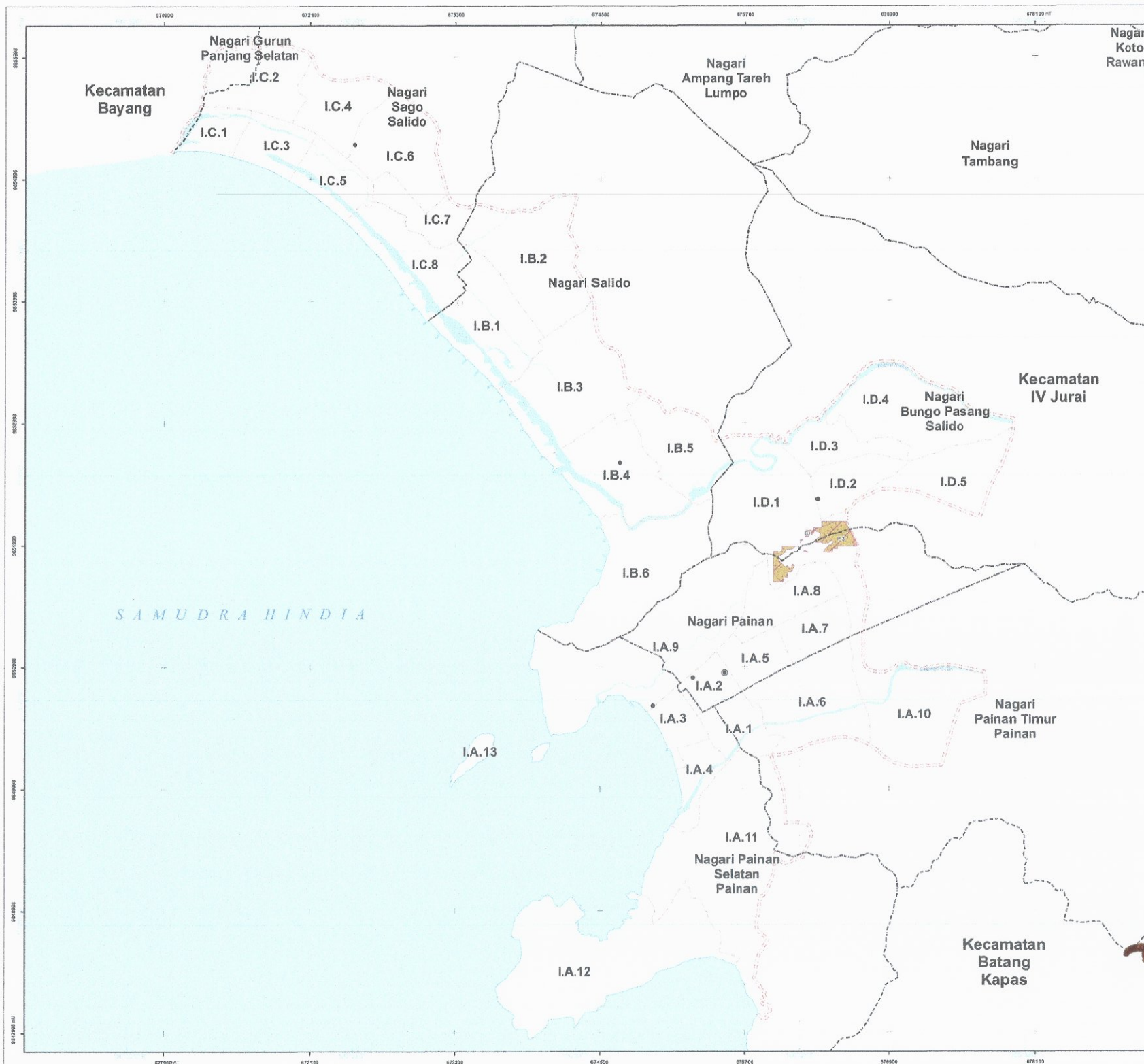
SUMBER DATA DAN RUMAH PETA :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RETR Wilayah Pesisir Selatan tahun 2010-2030
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR) Peta dasar perkotaan tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terintegrasi data Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Penetapan dan Pengawasan Batas Nagari Kecamatan IV Jurai tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2022-2023

CATATAN :

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,
BUPATI PESISIR SELATAN
Rahma Yul Anwar

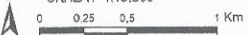




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IX.E
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA**

SKALA : 1:15.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Batas Perencanaan
 Ibukota Kabupaten/Kota	 Batas Kecamatan	 Batas VWP
 Ibukota Kecamatan	 Batas Desa/Nagari	 Batas SMP
 Ibukota Desa/Nagari		 Batas Blok

Perairan

-  Garis Pantai
-  Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

-  Zona Badan Jalan
-  Badan Jalan
-  Zona Pertanian
-  Perikanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

-  Pertambangan Mineral dan Batubara

Penjelasan Kode Lokasi

 VWP
 SMP
 Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Penelitian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2043
2. Data Satah Regional Tipologi (SRT) Peta dasar peruntukan tahun 2018
3. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Penelitian dan Pengkajian Tata Ruang Kecamatan IV Jurai tahun 2021
5. R-4011-PE/IZ/DP/RTSPX-2022
6. Pengumpulan data tahun 2022-2023

CATATAN :

Harap diinformasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Mengetahui,
BUPATI PESISIR SELATAN

Ruma Yul Anwar